



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 52 Volume XIII / Desember 2017

Resmikan Proyek Ketenagalistrikan di Banten Jokowi Tidak Dengar Lagi Keluhan Byar Pet

Menteri ESDM

Groundbreaking
dan Resmikan Proyek-Proyek
Kelistrikan di Nusa Tenggara

Menteri ESDM

Serahkan Penghargaan
IBEA 2017

Dirjen Gatrik Dampingi

Menteri ESDM

Tinjau Proyek PLTB Sidrap

Laporan Dari Perancis

Perkuat Kerja Sama
Dirjen Gatrik Lakukan Pertemuan
Bilateral dengan IEA

ENERGI BERKEADILAN

untuk Kesejahteraan Rakyat



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 52 Volume XIII |
DESEMBER 2017

SUSUNAN REDAKSI Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Kepala Bagian Rencana dan Laporan

Wiwid Muljadi

Heru Setiawan

Ear Marison

Hagni Surendro

Sudarti

Jackson Frans

Sangkam Tambunan

Pandu Satria Jati

Anggita Miftah Hairani

Utami Hikma Asih

Miftah Haris

Novan Akhiriyanto

Fanny Ristantono

M. Tomas Triananta

Wisnu Pujiyanto

Ridwan Budi Santoso

Ahmad Amiruddin

David F Silalahi

Hening Surya Bayu A.

Penyunting/ Editor

Zaenal

Novi Pravitasari

Dina Andriani

Ernawaty

Desain Grafis/Fotografer

Agus Supriadi

Ajat Munajat

Agah Muhammad Abduh

Adar

Sekretariat

Efrika Maritho

Emi Tursilah

Irman Suryana

Lutfhi

Suwarni

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.djk.esdm.go.id

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Penyediaan energi listrik harus efisien dan diikuti dengan harga listrik yang terjangkau. Untuk itu, selain mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, pemerintah juga mendorong harga listrik yang wajar.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus melakukan perbaikan agar pengembangan pembangkit EBT menjadi makin menarik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan revisi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017. Pengembangan pembangkit EBT pun terlihat masih diminati oleh investor.

Simak artikel mengenai Menteri ESDM yang menyaksikan beberapa penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) pembangkit EBT oleh PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP di Tajuk Utama. Simak pula artikel menarik mengenai kegiatan Ditjen Gatrik pada akhir tahun 2017.

Selamat membaca.

Salam Redaksi

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

- 1.Font penulisan naskah menggunakan Arial
- 2.Ukuran font yang digunakan 12
- 3.Jarak spasi penulisan 1,5
- 4.Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

- 1.Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
- 2.Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
- 3.Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
- 4.Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
- 5.Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
- 6.Naskah dikirim melalui email ke humas.djk@gmail.com
- 7.Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan *caption*
- 8.Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
- 9.Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI



Dari Redaksi **3**

Tajuk Utama

- 6 Penandatanganan Sebelas PPA, Pembangkit EBT Tetap Diminati
- 7 Menteri Jonan Saksikan Penandatanganan 9 PPA Pembangkit Energi Terbarukan

Liputan Khusus

- 8 Laporan Dari Perancis I:
Perkuat Kerja Sama, Dirjen Gatrik Lakukan Pertemuan Bilateral dengan IEA
- 9 Laporan dari Perancis II:
Dirjen Gatrik Tinjau PLT Arus Laut

Warta Kita

- 10 Buka Peringatan HLN Ke-72, Menteri ESDM Sampaikan Lima Pilar Pembenahan Sektor Ketenagalistrikan
- 11 Ditjen Ketenagalistrikan Gelar Forum
Konsensus Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 2017
- 12 Pemerintah Terus Tingkatkan Pemanfaatan Energi Bersih
- 13 Tingkatkan Kompetensi dan Koordinasi, PPNS Selenggarakan Workshop Tindak Pidana Ketenagalistrikan
- 14 Menteri Jonan: Listrik Harus Dapat Dinikmati Seluruh Lapisan Masyarakat
- 15 Dirjen Gatrik Beri Arahan Pada Tim Penyusun RUKN
- 16 Capaian Sektor Ketenagalistrikan Triwulan II/2017:
Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Meningkat
- 17 Daerah Diharap Susun RUKD dan Beri Masukan Terhadap Draft RUKN
- 18 Pemerintah Optimistis Target Bauran Pembangkit EBT Tercapai
- 19 Menteri Jonan: Wujudkan Harga Listrik yang Semakin Terjangkau oleh Masyarakat
- 20 Ini Upaya Pemerintah dalam Pemerataan Listrik Perdesaan
- 21 Selenggarakan Forum Konsultasi Publik, Ditjen Gatrik
Harapkan Profesionalisme BUJPTL
- 22 Harga Listrik di Hilir Diatur oleh Pemerintah
- 23 Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-72,
Semangat Bersatu Membangun Sektor ESDM Agar Ditingkatkan
- 24 Direktur Pembinaan Program
Ketenagalistrikan Hadiri Rangkaian the
35th AMEM 2017

- 25 Kebijakan Tata Kelola Ketenagalistrikan Untuk Listrik Semakin Efisien, Merata, dan Terjangkau
- 26 Dirjen Gatrik Dampingi Menteri ESDM Tinjau Proyek PLTB Sidrap
- 28 Dukung Penyediaan Listrik EBT, Ditjen Gatrik Selenggarakan Sosialisasi Investasi Usaha Listrik
- 29 Usulkan Revisi Aturan Jabatan Fungsional, Inspektur Ketenagalistrikan Selenggarakan FGD
- 31 Narasumber Di Indonesia Bussines Forum, Dirjen Gatrik Sampaikan Progres 35.000 MW PLN Diminta Optimalisasi Penurunan Susut Jaringan
- 32 Turunkan Susut, Ditjen Gatrik Titipkan Tiga Pesan Ini ke PLN
- 34 Undang Dinas ESDM, Ditjen Gatrik Selenggarakan Workshop Penyiapan Kunjungi Wilayah Usaha di Gresik, Dirjen Gatrik Pesan Pertahankan Keandalan Pembangkit
- 35 Dorong Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik, Ditjen Gatrik Gelar Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan
- 41 Ini Arahkan Menteri Kepada MKI Pada Peringatan HLN Ke-72
- 42 Buka Diklat Asset Manajemen PLTU, Sesditjen Gatrik: Tingkatkan Koordinasi Antar Unit Iklim Investasi EBT Menarik, PLN Segera Teken Kontrak Jual-Beli 9 Pembangkit Listrik EBT
- 44 Catatan Dari The 8th Asean Energy Regulator Network (AERN) Meeting
- 45 Rasio Listrik Perdesaan Ditargetkan 99,7% pada 2025
- 46 Dirjen Gatrik Pimpin Sesi Paralel Pertemuan Indonesia – China Energy Forum 2017
- 48 Menteri ESDM Serahkan Penghargaan IBEA 2017
- 49 Sesditjen Gatrik Beri Motivasi Kepada Para Pemberi Layanan
- 50 Pemerintah dan PLN Susun Peta Informasi Geospasial Ketenagalistrikan
- 51 Ditjen Gatrik Selenggarakan FGD Kerja Sama Energi ASEAN

Kolom

- 52 Perbandingan Kompor Gas dan Kompor Listrik Induksi

Resensi

- 56 Resensi buku

Pojok Peraturan

- 58 Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan Bulan Januari - Desember Tahun 2017



Resmikan Proyek Ketenagalistrikan di Banten, Jokowi Tidak Dengar Lagi Keluhan Byar Pet



Sosialisasikan Kebijakan Pelayanan Ketenagalistrikan, Masyarakat Diharap Pahami Hak dan Kewajibannya



Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi di Sektor Ketenagalistrikan



Menteri ESDM Groundbreaking dan Resmikan Proyek-Proyek Kelistrikan di Nusa Tenggara

Penandatanganan Sebelas PPA, Pembangkit EBT Tetap Diminati



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Jumat (9/8) menyaksikan penandatanganan sebelas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producer (IPP). Penandatanganan PPA ini menunjukkan bahwa pembangkit listrik EBT tetap diminati oleh pengembang listrik swasta sesuai dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Jonan, penyediaan energi listrik harus efisien dan diikuti dengan harga listrik yang terjangkau. Untuk itu, selain mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, pemerintah juga mendorong harga listrik yang wajar. "Kalau listrik tersedia, harganya harus terjangkau oleh rakyat" ungkap Jonan. Ia kemudian mengajak tamu undangan untuk membayangkan masyarakat yang tidak pernah mendapatkan akses listrik dalam hidupnya. Suatu hari ada kabel listrik lewat dapan rumahnya tetapi dia juga tidak mampu beli. "Sakit hati sosialnya akan panjang sekali dan itu akan menjadi tanggungan sosial yang harus kita kerjakan dan tangani bersama-sama" ungkapnya.

Penandatanganan sebelas PPA yang dilakukan ini berkapasitas total 291,4 MW, tersebar di Provinsi Sumatera Utara enam pembangkit, dan masing-masing satu pembangkit di Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Bengkulu dan Sulawesi Selatan. Penandatanganan ini merupakan lanjutan penandatanganan PPA pembangkit EBT yang dilakukan pada 2 Agustus 2017 yang berkapasitas 257,17 MW.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus melakukan perbaikan agar pengembangan pembangkit EBT menjadi makin menarik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan revisi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017. Dengan revisi ini, pemerintah ingin mengoptimalkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik EBT yang diharapkan berdampak pada tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat maupun tarif listrik yang kompetitif bagi dunia industri.

"Saya sangat mengapresiasi tarifnya makin lama makin kompetitif dan saya juga berharap bahwa makin lama prosesnya dapat dipercepat," ungkap Jonan.

Sebelas proyek pembangkit tenaga listrik yang ditandatangani sebagai berikut:

1. PLTM Aek Sibundong (8 MW) di Sumatera Utara
2. PLTM Aek Situmandi (7 MW) di Sumatera Utara
3. PLTM Aek Sigeaon (3 MW) di Sumatera Utara
4. PLTM Sisira (9,8 MW) di Sumatera Utara
5. PLTM Batang Toru 4 (10 MW) di Sumatera Utara
6. PLTM Bayang Nyalo (6 MW) di Sumatera Barat
7. PLTM Batu Brak (7,7 MW) di Lampung
8. PLTM Kunci Putih (0,9 MW) di Jawa Tengah
9. PLTA Air Putih (21 MW) di Bengkulu
10. PLTA Pakkat (18 MW) di Sumatera Utara
11. PLTA Buttu Batu (200 MW) di Sulawesi Selatan. (PSJ)

Menteri Jonan Saksikan Penandatanganan 9 PPA Pembangkit Energi Terbarukan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menyaksikan penandatanganan sembilan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) pembangkit dari energi terbarukan (EBT) oleh PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), Kamis (16/11), di kantor Kementerian ESDM.

Sembilan pembangkit IPP energi terbarukan yang melakukan penandatanganan PPA kali ini terdiri dari satu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), satu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan tujuh Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) dengan total kapasitas mencapai 640,65 MW dengan investasi Rp 20,4 triliun. Pembangkit-pembangkit tersebut berlokasi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Jonan menyampaikan penandatanganan PPA EBT ini merupakan lanjutan dua penandatanganan sebelumnya, yakni pada tanggal 2 Agustus 2017 (257,17 MW) dan tanggal 8 September 2017 (291,4 MW). Dengan demikian, total kapasitas pembangkit EBT yang sudah menandatangani PPA pada tahun ini sebesar 1.189,22 MW pada 69 proyek.

"Tiga tahun sebelumnya, pada 2014, 2015, dan 2016 total yang ditandatangani tidak ada 60 proyek, tidak ada sampai hampir 1.200 MW. Tapi untuk tahun ini saja sudah hampir 1.200 MW," ungkap Jonan. Hal ini menunjukkan iklim investasi untuk EBT masih menarik.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Jonan kembali berpesan pada PT PLN (Persero) dan IPP untuk menjaga tarif listrik agar terjangkau bagi masyarakat. "Mohon pengertian kedua belah pihak untuk sama-sama menjaga agar harga listrik bisa terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.

Berikut daftar sembilan proyek pembangkit listrik pada PPA tanggal 16 November 2017:

1. PLTP Rantau Dedap
 - Kapasitas : 86 MW tahap 1 (proven reserve)
 - Pengembang : PT Supreme Energy Rantau Dedap
 - Lokasi : Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Sumatera Selatan
 - Nilai Investasi : Rp. 8,20 Triliun
 - Rencana COD : 2020
 - Harga Jual : 11,76 cUS\$/kWh
2. PLTA Poso Peaker
 - Kapasitas : 515 MW
 - Pengembang : PT Poso Energy
 - Lokasi : Desa Selawana, Pamona Utara, Poso, Sulawesi Tengah
 - Nilai Investasi : Rp. 11,12 Triliun
 - Rencana COD : 2021
 - Harga Jual : 8,4000 cUS\$/kWh

3. PLTM Cibanteng
 - Kapasitas : 4,2 MW
 - Pengembang : PT Prima Atria Energi
 - Lokasi : Desa Cibanteng, Cianjur, Jawa Barat
 - Nilai Investasi : Rp. 71,4 Miliar
 - Rencana COD : Januari 2019
 - Harga Jual : Rp. 866 /kWh atau 6,51 cUS\$/kWh
4. PLTM Cikaso 3
 - Kapasitas : 9,9 MW
 - Pengembang : PT Zhong Min Hydro Indonesia
 - Lokasi : Desa Mekarsari, Sukabumi, Jawa Barat
 - Nilai Investasi : Rp. 182,21 Miliar
 - Rencana COD : Juli 2019
 - Harga Jual : Rp. 866 /kWh atau 6,51 cUS\$/kWh
5. PLTM Tanjungtirta
 - Kapasitas : 8 MW
 - Pengembang : PT Maji Biru Pusaka
 - Lokasi : Desa Tanjungtirta, Mrica, Jawa Tengah
 - Nilai Investasi : Rp 201,6 Miliar
 - Rencana COD : November 2018
 - Harga Jual : Rp. 868 /kWh atau 6,52 cUS\$/kWh
6. PLTM Kincang 1
 - Kapasitas : 0,35 MW
 - Pengembang : KPRI Koperca (Koperasi Pegawai Indonesia Power)
 - Lokasi : Desa Kincang, Banjarnegara, Jawa Tengah
 - Nilai Investasi : Rp. 9,14 Miliar
 - Rencana COD : Desember 2017
 - Harga Jual : Rp. 868 /kWh atau 6,52 cUS\$/kWh
7. PLTM Bakal Semarak
 - Kapasitas : 5 MW
 - Pengembang : PT Semarak Kita Bersama
 - Lokasi : Desa Sipoltong, Sidikalang, Sumatera Utara
 - Nilai Investasi : Rp. 125,64 Miliar
 - Rencana COD : Maret 2020
 - Harga Jual : Rp. 1.049,75/kWh atau 7,89 cUS\$/kWh
8. PLTM Bone Bolango
 - Kapasitas : 9,9 MW
 - Pengembang : PT Bone Bolango Energi
 - Lokasi : Desa Poduwoma, Bone Bolango, Gorontalo
 - Nilai Investasi : Rp. 416,47 Miliar
 - Rencana COD : Oktober 2020
 - Harga Jual : Rp. 1.400 /kWh atau 10,52 cUS\$/kWh
9. PLTA Koko Babak
 - Kapasitas : 2,3 MW
 - Pengembang : PT Sumber Daya Investasi
 - Lokasi : Desa Aik Berik, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
 - Nilai Investasi : Rp. 86,79 Miliar
 - Rencana COD : April 2019
 - Harga Jual : Rp. 1.384,65 /kWh atau 10,40 cUS\$/kWh (AMH)

Laporan Dari Perancis I:

Perkuat Kerja Sama, Dirjen Gatrik Lakukan Pertemuan Bilateral dengan IEA



Paris, Perancis - Di sela-sela pertemuan International Energy Agency (IEA) Ministerial Meeting, Dirjen Ketenagalistrikan, Andy N. Sommeng melakukan bilateral meeting dengan IEA unit Gas, Coal & Power Division; System Integration of Renewables Unit; dan Economics and Investment Office untuk membahas kerjasama diantara kedua belah pihak, Rabu (8/11).

Dalam pengantar diskusinya, Andy menyampaikan bahwa pengelolaan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan senantiasa memperhatikan "Energy Trilemma", yaitu energy security; energy equity; dan environmental sustainability. Terkait "Energy Security" penerapannya dilakukan antara lain dengan cara penambahan kapasitas pembangkit dan peningkatan ketersediaan listrik; sedangkan terkait "Energy Equity" dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas melalui distribusi yang adil yang dicerminkan melalui peningkatan rasio elektrifikasi dan harga listrik yang terjangkau. Adapun terkait "Environmental Sustainability" penerapannya dilakukan dengan cara bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan selain harus andal, dan berkualitas, juga harus ramah lingkungan.

Pihak IEA menyatakan bahwa Indonesia adalah negara penting yang dilihat oleh IEA mengingat bahwa perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia menjadi tolok ukur perkembangan ketenagalistrikan di Asia Tenggara. Selain itu, sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, upaya pemenuhan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah model yang dapat menjadi rujukan bagi negara lainnya.

Beberapa area kerjasama antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan IEA yang dapat dilakukan secara bersama-sama, antara lain di bidang perencanaan ketenagalistrikan; promosi investasi pembiayaan di sektor ketenagalistrikan, utamanya untuk mengidentifikasi sumber keuangan di dalam negeri, kebijakan menurunkan resiko untuk meningkatkan partisipasi swasta dan mengurangi biaya pendanaan; analisa model bisnis dan kebijakan investasi oleh PLN; dan panduan tentang cara yang berbeda untuk memanfaatkan pasar keuangan yang ada berdasarkan praktek terbaik dan pengalaman internasional. Kerjasama ini juga menyentuh upaya pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah terpencil; penurunan biaya energi; dan integrasi grid.

Area kerjasama tersebut telah dituangkan dalam Joint Work Programme (JWP) yang telah ditandatangani antara Kementerian ESDM dan IEA di Paris pada tanggal 8 November 2017 untuk menguatkan ketahanan energi guna menghadapi pertumbuhan global yang berkelanjutan. Area kerjasama dalam JWP pun sangat luas meliputi energy data and statistic, emergency policy and energy security, oil and gas market, power sector and renewable energy, energy efficiency, dan climate change and clean energy technology. (CA)

Laporan dari Perancis II:

Dirjen Gatrik Tinjau PLT Arus Laut



Cherbourg, Perancis - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy N. Sommeng, selaku salah satu delegasi Indonesia pada pertemuan IEA Ministerial Meeting berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke salah satu perusahaan yang mengembangkan energi arus laut, yaitu Naval Energies yang berlokasi di Cherbourg, Perancis, pada Kamis (9/11).

Energi arus laut yang dikembangkan oleh Naval Energies memiliki teknologi turbin sederhana, yaitu hanya memiliki satu bagian yang bergerak menggunakan air laut sebagai pelumas. Dengan teknologi ini, biaya operasi dan pemeliharaan lebih rendah jika dibandingkan menggunakan teknologi propeller. Teknologi ini dikenal dengan nama OpenHydro Open-Centre Turbine. Turbin memiliki diameter 16 meter dan diletakkan di dasar laut dengan kedalaman sekitar 50 meter, dengan kecepatan arus sebesar 2-5 meter perdetik dapat menghasilkan daya listrik sebesar 2 MW. Untuk mendapatkan kapasitas listrik yang optimal, turbin dapat dirangkai secara seri.

Bekerjasama dengan PT Arus Indonesia Raya (AIR), Naval Energies bermaksud untuk mengembangkan industri turbin arus laut di Indonesia. Studi potensi arus laut telah dilaksanakan PT AIR dengan Naval Energies di 10 titik lokasi, dan dari hasil studi diperoleh potensi listrik yang dapat dikembangkan dari arus laut mencapai sebesar 1,4 GW.

Teknologi ini dapat menjadi salah satu pilihan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. (CA)



Buka Peringatan HLN Ke-72,

Menteri ESDM Sampaikan Lima Pilar Pembinaan Sektor Ketenagalistrikan



Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka rangkaian acara Seminar dan Pameran dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-72 di Jakarta Convention Center, Kamis (28/3). Jonan mewakili Presiden Joko Widodo membuka sekaligus menyampaikan arahan terkait kebijakan ketenagalistrikan. Menurut Jonan, saat ini pemerintah fokus pada lima pilar dalam meningkatkan tata kelola sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Kelima pilar yang dimaksud Jonan adalah meningkatnya rasio elektrifikasi, distribusi yang adil, keberlanjutan terkait kesetaraan dan keberlanjutan, iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi serta tata kelola yang baik.

Terkait perkembangan program 35.000 MW, Pemerintah terus berkomitmen melanjutkan program strategis nasional tersebut. "Arahan Bapak Presiden tetap akan dilanjutkan walaupun tidak semua selesai di tahun 2019," jelas Jonan. Selanjutnya ia menyatakan bahwa program 35.000 MW akan masuk sebagai rencana jangka panjang nasional (multi-years). Ia menargetkan pada tahun 2019, realisasi program tersebut akan mencapai sekitar 20.000 MW.

Terkait rasio elektrifikasi, pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan melakukan berbagai program. Saat ini rasio elektrifikasi mencapai angka 92,03%. Selanjutnya pemerintah menargetkan angka ini dapat mencapai 97 di tahun 2019. "Tapi saya bilang ke Pak Sofyan (Dirut PLN) jangan 97% tapi 99%," ungkap Jonan. Dalam sambutannya Jonan juga mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun ini tidak ada kenaikan tarif listrik.

Pemerintah ingin agar tarif listrik terjangkau oleh masyarakat dengan berbagai efisiensi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).

Peringatan Hari Listrik Nasional ke-72 dilaksanakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Nasional (MKI) dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Tema yang diangkat tahun ini adalah "Mewujudkan Catur Cita Ketenagalistrikan: Berkecukupan, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Merata untuk Menuju "Indonesia Terang". Selain pameran tentang inovasi seputar ketenagalistrikan, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai pembicara dalam CEO meeting dan seminar-seminar yang diselenggarakan.

Kementerian ESDM sendiri dalam pameran ini menampilkan tema energi berkeadilan di sektor ketenagalistrikan. Kementerian ESDM yang diwakili Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE dan Badan Litbang ESDM menampilkan contoh rumah sederhana yang telah mendapatkan listrik melalui pra elektrifikasi dari pemerintah yang membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), serta masuknya listrik melalui jaringan listrik perdesaan.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Ketua MKI, Supangkat Iwan Santoso. Peresmian sendiri dilakukan dengan menabuh tifa, alat musik tradisional dari Indonesia bagian timur. (PSJ)

Ditjen Ketenagalistrikan

Gelar Forum Konsensus Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 2017



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad mewakili Dirjen Ketenagalistrikan, Kamis (30/11), membuka Forum Konsensus Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) Tahun 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Forum Konsensus ini diadakan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 13 Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Konsep Standar Kompetensi yang disusun oleh Panitia Teknik serta tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan dibahas dalam forum konsensus untuk disepakati menjadi rancangan SKTTK.

"Dengan memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik, maka para tenaga kerja di subsektor ketenagalistrikan memiliki bukti terhadap kemampuan formal atas kompetensi yang dimilikinya. Selain itu sertifikat kompetensi dapat meningkatkan nilai tambah para tenaga teknik saat bekerja di luar negeri. Sertifikat kompetensi juga berfungsi sebagai barrier dalam menyeleksi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia," ujar Munir Ahmad saat membacakan sambutan Dirjen Ketenagalistrikan.

Standar kompetensi pada subsektor ketenagalistrikan sebenarnya telah diberlakukan sejak tahun 2001 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2052K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2017 yang baru diterbitkan ini mencabut Keputusan Menteri tersebut. Perubahan paradigma ketentuan standar kompetensi pada subsektor ketenagalistrikan sebagaimana yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2017 memberikan dampak pada beberapa hal.

Pertama, penyederhanaan standar kompetensi. Jumlah standar kompetensi semula berjumlah 2.795 standar yang disusun berdasar unit kompetensi telah disederhanakan menjadi +-400 standar kompetensi yang disusun berdasarkan okupasi jabatan.

Kedua, efisiensi pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Penerbitan Sertifikat Kompetensi semula berdasarkan 1 (satu) standar kompetensi, sekarang berdasarkan 1 (satu) okupasi jabatan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi menjadi efisien pada proses penerbitan Sertifikat Kompetensi, karena biaya sertifikasi lebih murah dan waktu pelaksanaan uji sertifikasi lebih singkat.

Ketiga, sinergi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Okupasi jabatan ketenagalistrikan diberlakukan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang bersinergi dengan kementerian terkait lainnya dalam menyiapkan SDM berbasis kompetensi ketenagalistrikan melalui jalur pendidikan vokasi.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 ini mengatur juga harmonisasi SKTTK yang diberlakukan oleh Kementerian ESDM dengan Standar Kompetensi lainnya, seperti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diberlakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan harmonisasi ini, pelaksanaan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga teknik, tenaga kerja, atau peserta didik dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang sama.

Ada empat bidang yang dibahas dalam Forum Konsensus ini, yakni Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Bidang Distribusi Tenaga Listrik, dan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. Peserta yang hadir berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, perusahaan di subsektor ketenagalistrikan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, serta para pakar/ tenaga ahli di bidang standar kompetensi ketenagalistrikan. (AMH)

Pemerintah Terus Tingkatkan Pemanfaatan Energi Bersih

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi bersih, salah satunya dengan mendorong kendaraan listrik. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan payung hukum terkait percepatan kendaraan listrik untuk sektor transportasi. Program mobil listrik diharapkan akan membawa manfaat bagi Indonesia seperti, pengurangan emisi dari gas buang sehingga membuat lingkungan lebih bersih, meningkatkan kemandirian energi nasional, serta menghemat devisa.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mewakili Dirjen Ketenagalistrikan saat memberikan keynote speech dalam Conference of The Indonesian Electrical Power Society (CIEPS) 2017, Rabu (6/9). Konferensi ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian pameran bertajuk "Electric, Power, and Renewable Energy Indonesia 2017" yang dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Satry Nugraha mewakili Menteri ESDM.

Selain membahas program mobil listrik, Alihuddin juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk melistriki masyarakat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PT PLN (Persero).

"Bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, cara yang dilakukan pemerintah adalah memberikan praelektifikasi, melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE),"ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Pada tahun 2017, Pemerintah menargetkan pembagian paket LTSHE sebanyak 95.729 kepada 6 provinsi timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi.

Lebih lanjut, ia mengatakan program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Pada tahun 2017, Pemerintah menargetkan pembagian paket LTSHE sebanyak 95.729 kepada 6 provinsi timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi.

Cara selanjutnya untuk melistriki masyarakat adalah melalui pengembangan Micro Grid-Off Grid. Ini untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, namun tinggal bersama dalam satu wilayah. Cara ini digunakan pemerintah melalui 'usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil' sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 38/2016. Dengan aturan ini, masyarakat yang tinggal di desa belum berkembang, terpencil, pulau terluar atau perbatasan dapat dilistriki oleh badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi yang diberikan wilayah usaha tersendiri oleh pemerintah. Adapun energi primer yang diutamakan untuk digunakan dalam membangkitkan tenaga listrik adalah energi baru terbarukan.

Pameran "Electric, Power, and Renewable Energy Indonesia 2017" diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada tanggal 6-9 September 2017. Ditjen Ketenagalistrikan turut berpartisipasi dalam pameran itu dengan membuka booth guna menginformasikan kebijakan-kebijakan terbaru di bidang ketenagalistrikan. (AMH)



Tingkatkan Kompetensi dan Koordinasi, PPNS Selenggarakan Workshop Tindak Pidana Ketenagalistrikan



Pemerintah berharap masyarakat melapor bila terdapat tindak pidana di bidang ketenagalistrikan yang berdampak luas. Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang akan memproses tindak pidana tersebut. Untuk itu PPNS perlu terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum pidana dan kemampuan lain yang diperlukan. PPNS juga perlu terus menjalin komunikasi dengan Polri dan Kejaksaan agar tercipta satu pemahaman dalam koordinasi, mulai dari penyelidikan sampai dengan penuntutan di persidangan.

Guna membekali PPNS Ketenagalistrikan dan menjalin komunikasi dengan instansi terkait, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyelenggarakan Workshop Tindak Pidana Di Bidang Ketenagalistrikan, pada Kamis (7/9). Workshop yang dilaksanakan di Bekasi ini dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Muchtar Husain selaku koordinator PPNS sektor ESDM. Workshop ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, Korwas Biro PPNS Bareskrim POLRI, Reskrimsus Polda Metro Jaya, serta perwakilan PT PLN (Persero).

Muchtar Husain dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai koordinator ia tidak terlibat dalam teknis penyidikan. Menurutnya seluruh kewenangan PPNS dilakukan melalui kepala PPNS yang sudah ditunjuk oleh Dirjen masing-masing. Koordinator PPNS akan menjadi pintu keluar untuk melaporkan segala sesuatu terkait kegiatan yang dilakukan. Selaku Koordinator, Muchtar mengharapkan dalam workshop ini ia mendapat informasi terkait apa yang sedang dan akan dilakukan terkait penyidikan, karena penyidikan itu sendiri tidak sekonyong-konyong dilakukan tanpa ada indikasi awal. "Ketika kita masuk melakukan penyidikan, pastikan itu terbukti karena menyangkut nama baik seseorang atau lembaga, jangan sampai dijadikan mainan", ujarnya.

Andy Sommeng berharap agar PPNS Ketenagalistrikan terus meningkatkan kemampuan, baik dari sisi administrasi penyidikan maupun teknis dan taktis. "Diharapkan melalui workshop ini Ditjen Ketenagalistrikan mempunyai sinergi yang baik antara PPNS, POLRI dan Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan," jelasnya. Ia menyampaikan bahwa sektor ketenagalistrikan mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mendorong berjalannya roda perekonomian nasional.

Menurut Andy, tenaga listrik merupakan salah satu pemanfaatan kekayaan alam, oleh sebab itu pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mengatur perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Sesuai amanat UU tersebut, PPNS Ketenagalistrikan memiliki kewenangan yang cukup luas antara lain melakukan pemeriksaan, pemanggilan, pengeledahan, penyitaan bahkan menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. Sebagai informasi, sejak tahun 2013 PPNS Ketenagalistrikan telah banyak melakukan penyidikan dan telah P21. Dengan kata lain penyidikan oleh PPNS tersebut telah lengkap dan tersangka serta barang bukti dilimpahkan kepada Jaksa.

Usai pembukaan, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Alihuddin Sitompul selaku Kepala PPNS Ketenagalistrikan dan AKBP Ruspida Supari mewakili Biro PPNS Bareskrim POLRI menyampaikan paparan pada sesi pertama. Dalam materinya Alihuddin menyampaikan bagaimana peran dan keberadaan PPNS Ketenagalistrikan berdasarkan UU 30 Tahun 2009. AKBP Ruspida dalam presentasinya menyampaikan Sinkronisasi dan Dukungan POLRI dalam penanganan tindak pidana oleh PPNS. Workshop ini ditutup dengan pemaparan Jisman Hutajulu selaku Ketua PPNS Ketenagalistrikan periode 2014-2016 terkait penanganan kasus yang pernah ditangani oleh PPNS Ketenagalistrikan. (JFN/PSJ)

Menteri Jonan:

Listrik Harus Dapat Dinikmati Seluruh Lapisan Masyarakat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali mengingatkan jika listrik harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan harga terjangkau, termasuk bagi mereka yang tinggal di perdesaan. Pemerintah memang menaruh perhatian serius untuk melistriki 2.500 desa belum berkembang yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Desa-desa tersebut berada di daerah perbatasan, daerah terpencil, dan sepanjang garis pantai. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM adalah dengan mengeluarkan Permen ESDM Nomor 38/2016 mengenai percepatan elektrifikasi perdesaan.

"Kita ingin menerangi desa-desa yang belum berlistrik. Kita kerjakan dua tahun, yang penting di rumah ada lampunya," Jonan menuturkan. Di tahun 2017 ini, LTSHE dipasang di 6 provinsi ter-timur Indonesia untuk melistriki 95.729 rumah. Untuk tahun depan, targetnya adalah terpasang di 15 provinsi guna melistriki 255.250 rumah.

Dalam kesempatan yang sama, Jonan juga menyampaikan bahwa EBT masih menarik bagi investor. Ia lalu menunjukkan grafik pengembangan EBT dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2014 ditandatangani 15 kontrak, 2015 ada 14 kontrak, dan 2016 ada 16 kontrak.



"Terdapat 2.500 desa yang listriknya belum masuk sama sekali, kita akan fokus ke sana karena pemerataan itu penting," ujar Jonan dalam Forum Diskusi Profesional (FORDIP) Strategi Penyelesaian Power Plant 35.000 MW hari ini (14/9) di Gedung MM UGM, Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng dan anggota Dewan Energi Nasional Tumiran.

Penyediaan listrik untuk perdesaan ini diutamakan berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan total kapasitas hingga 50 MW. Jonan lalu menjelaskan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebagai upaya untuk menerangi pelosok negeri. LTSHE ini cocok untuk rumah pedesaan yang secara geografis sangat terisolir, distribusi penduduknya tersebar, serta sulit dijangkau jaringan PT PLN (Persero).

"Sementara pada tahun 2017 sampai dengan bulan September saja sudah ditandatangani 60 kontrak. Itu bukti EBT masih diminati," lanjutnya.

Program percepatan pembangunan pembangkit 35.000 MW saat ini masih didominasi oleh pembangkit dengan bahan bakar batubara yang kurang ramah lingkungan. Namun untuk mendukung program energi bersih sebagai konsekuensi dari Paris Agreement, Pemerintah berkomitmen mendorong penggunaan teknologi batubara ramah lingkungan (clean coal technology) untuk setiap pembangkit listrik yang dibangun.

Hal ini juga untuk mendukung kebijakan energi nasional yang telah digariskan melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana energi terbarukan ditargetkan akan memberi kontribusi sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Pada tahun 2025 kapasitas pembangkit listrik yang diperlukan akan sebesar 136 GW dimana 45 GW diantaranya bersumber dari EBT. (AMH)

Dirjen Gatrik Beri Arahan Pada Tim Penyusun RUKN



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Som-meng, Jumat (15/9) memberikan arahan pada tim penyusun draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2018 - 2037 di Bogor Jawa Barat. Andy berpesan kepada tim penyusun agar bekerja dengan baik karena RUKN ini merupakan dokumen penting yang menentukan arah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ke depan. Andy juga berharap RUKN yang akan disusun ini benar-benar sesuai dengan kondisi ketenagalistrikan dan sesuai dengan regulasi yang ada.

"Menteri ESDM memberi perhatian pada RUKN ini, beliau akan hadir memberikan masukan pada konsep RUKN ini," ungkap Andy.

Menurutnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan selalu berpesan untuk memperhatikan empat elemen dasar di sektor ketenagalistrikan. Empat elemen dasar tersebut adalah terus meningkatkan kapasitas terpasang cukup, meningkatkan rasio elektrifikasi, menjamin penyediaan listrik dengan harga murah, serta menyediakan listrik dengan kualitas yang baik, handal dan aman.

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik telah dilakukan dengan meluncurkan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW.

Program peningkatan rasio elektrifikasi juga terus dilakukan dengan program listrik perdesaan, pemberian bantuan Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), dan program melistriki 2.500 desa dengan mengeluarkan Permen ESDM No. 38/2016 tentang usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Penyediaan listrik dengan harga murah terus dilakukan dengan mengeluarkan regulasi terkait jual beli listrik. Dengan berbagai aturan baru terkait jual beli listrik antara IPP dan PLN, pemerintah mengharapkan harga jual listrik murah dan yang dibayarkan masyarakat tidak mahal.

Dokumen RUKN ini berisikan tentang kebijakan ketenagalistrikan nasional, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi kelistrikan saat ini, rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan, potensi sumber energi primer di berbagai provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya. Dalam rangkaian penyusunan RUKN ini nanti, Ditjen Ketenagalistrikan juga akan mengundang pemerintah daerah, sehingga masing-masing provinsi dapat menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). (PSJ)

Capaian Sektor Ketenagalistrikan Triwulan II/2017: Realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Meningkat



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng menggelar konferensi pers capaian sektor ketenagalistrikan triwulan II tahun 2017, Selasa (19/9), di Jakarta. Andy didampingi oleh Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono serta Direktur Pengadaan Strategis 2 Supangkat Iwan Santoso dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Ahmad Rofik dari PT PLN (Persero). Capaian sektor ketenagalistrikan ini melingkupi progres Program 35.000 MW, Program Listrik Perdesaan, pertumbuhan dan penjualan listrik, serta bauran energi.

"Kami akan memberikan informasi apa saja yang sudah dilakukan, apa saja capaian-capaian sektor ketenagalistrikan karena ini adalah hak publik," ujar Andy mengawali paparannya. Andy menambahkan, PT PLN (Persero) selalumelaporkan kemajuan dari program-program pemerintah yang ditugaskan kepada BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan itu. Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) melalui surat nomor 928/AGA.00.02/DIRUT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 menyampaikan Laporan PT PLN Kepada Menteri ESDM terkait Realisasi Pertumbuhan Penjualan Listrik, Volume Penjualan dan bauran energi Triwulan II Tahun 2017.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengapresiasi meningkatnya realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) pada triwulan II tahun 2017 yang melebihi target APBN 2017, dimana energi panas bumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).

"Sebenarnya kalau targetnya pengelolaan energi listrik, kalau porsi EBT dalam hal ini air lebih besar, memang menekan tarif. Tarif listrik itu akan semakin turun," ujar Andy.

Terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) melaporkan pembangkit yang telah beroperasi secara komersial/Commercial Operation Date (COD) mencapai 1.253 MW termasuk MVPP sebesar 480 MW, terdiri dari: MVPP Sumut 240 MW, MVPP Amurang 120 MW, MVPP Kupang 60 MW dan MVPP Ambon 60 MW. Target kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PLN (Persero) untuk September hingga Desember 2017 sebesar 2.850 MW (perencanaan 1.256 MW dan pengadaan 1.594 MW).

Target Power Purchase Agreement (PPA) Independent Power Producer (IPP) pada September hingga Desember 2017 sebesar 5.250 MW (perencanaan 2.600 MW dan pengadaan 2.650 MW).

"Jumlah desa berlistrik sampai dengan Agustus 2017 sebesar 73.149 desa. Angka ini naik 1.008 desa dari tahun 2016 yang berjumlah 72.141 desa," Andy menjelaskan terkait Program Listrik Perdesaan.

Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan bauran energi PT PLN (Persero) sesuai target yang tertuang dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2017-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tanggal 29 Maret 2017. Selain itu, Pemerintah juga berharap PT PLN (Persero) melakukan efisiensi di segala lini agar tarif listrik dapat terjangkau sehingga terwujud energi berkeadilan. (AMH)

Daerah Diharap Susun RUKD dan Beri Masukan Terhadap Draft RUKN



Setiap Pemerintah Daerah diharapkan menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, saat membuka Rapat Pembahasan Penyiapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2018-2037, di Tangerang Selatan, Rabu (20/9). RUKD nanti disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rapat pembahasan draft RUKN ini juga diharapkan dapat menampung aspirasi dari masing-masing daerah.

Andy menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa penguasaan ketenagalistrikan adalah di bawah kendali negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). "RUKD perlu disusun oleh Pemerintah Daerah karena akan dijadikan pedoman bagi pemegang IUPTL dalam menyusun RUPTL," ungkapnya dalam sambutan. "Sehingga apa yang diinginkan Pemerintah Daerah terkait pembangunan ketenagalistrikan harus dituangkan dalam RUKD yang kemudian diakomodir oleh pemegang IUPTL dalam dokumen RUPTL," jelasnya.

Forum penyusunan draft RUKN 2018 - 2037 ini diharapkan Andy dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya oleh pemerintah daerah, untuk menyampaikan sejauh mana implementasi dari perencanaan ketenagalistrikan dan apa saja hal-hal yang bersifat mendesak dan perlu difasilitasi untuk penyelesaiannya. "Sehingga nantinya akan diperoleh hasil terbaik yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk perencanaan ketenagalistrikan," ungkapnya.

Rapat penyusunan draft RUKN ini mengundang seluruh pemerintah daerah provinsi, Kementerian/Lembaga terkait, dan PT PLN (Persero). Setelah sambutan Dirjen Ketenagalistrikan, diskusi dilanjutkan dengan berbagai isu pokok dalam draft RUKN seperti proyeksi kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer, perkembangan dan target rasio elektrifikasi, kebijakan investasi ketenagalistrikan, hingga kebijakan program listrik perdesaan. Paparan juga dilanjutkan dengan hal-hal yang terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan dan kebijakan usaha penyediaan tenaga listrik.

RUKN ini akan berisikan tentang kebijakan ketenagalistrikan nasional, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, termasuk potensi sumber energi primer di berbagai provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya. Proyeksi dalam RUKN bersifat indikatif dan tidak berisikan daftar proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik karena hal tersebut bersifat pengusahaan yang akan diuraikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang harus disusun oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha. (PSJ)

Pemerintah Optimistis Target Bauran Pembangkit EBT Tercapai



Pemerintah optimistis target bauran energi primer dari energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 tercapai. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng saat berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Jumat (22/9). "Pemerintah tetap on the right track dalam komposisi bauran energi. Kami terus komitmen mengembangkan EBT (energi baru terbarukan-red) dalam pembangkit listrik. Dengan melihat perkembangan yang ada, kami optimistis target bauran energi pada 2025 tercapai," ungkap Andy

Dari data Kementerian ESDM, setiap tahun terdapat IPP dari pembangkit EBT yang telah menandatangani PPA yang berarti pengembangan EBT masih menarik bagi investor. Sebagai gambaran pada tahun 2014 ditandatangani 15 kontrak, 2015 ada 14 kontrak, dan 2016 ada 16 kontrak, sementara pada tahun 2017 sampai dengan bulan September saja sudah ditandatangani 60 kontrak. Pemerintah sendiri terus menunjukkan komitmen pengembangan EBT dalam bauran energi. Dengan memanfaatkan EBT, diharapkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bisa turun guna mengupayakan dukungan Indonesia terhadap Paris Agreement.

Dalam kunjungan ke Redaksi Kompas, Andy didampingi oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi, Direktur Utama PT PN (Persero) Sofyan Basir, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, Nusatenggara PT PLN Djoko Rahardjo Abumanan. Rombongan diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy. Dalam kesempatan tersebut Andy memaparkan tujuan kehadiran rombongan adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus memaparkan berbagai kebijakan pemerintah di bidang ketenagalistrikan. "Agar tidak terjadi asimetri informasi dalam pemberitaan di bidang ketenagalistrikan," ungkap Andy.

Sofyan menekankan bahwa PT PLN (Persero) bersama pemerintah komit untuk menjaga security of supply. "Pengendalian tarif harus dilakukan dengan kontrol supply energi, tujuannya adalah agar tarif listrik tidak naik," papar Sofyan. Ia menjelaskan bahwa tarif listrik dalam dua tahun ini turun karena PLN telah melakukan berbagai efisiensi, diantaranya mengganti BBM dengan bahan bakar lainnya dan melakukan efisiensi batubara. "Kalau tidak seperti itu tarif (listrik) lompat, yang dirugikan rakyat," ungkap Sofyan.

Dalam kunjungan ke Redaksi Kompas, Andy didampingi oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi, Direktur Utama PT PN (Persero) Sofyan Basir, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, Nusatenggara PT PLN Djoko Rahardjo Abumanan. Rombongan diterima oleh Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy. Dalam kesempatan tersebut Andy memaparkan tujuan kehadiran rombongan adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus memaparkan berbagai kebijakan pemerintah di bidang ketenagalistrikan. "Agar tidak terjadi asimetri informasi dalam pemberitaan di bidang ketenagalistrikan," ungkap Andy.

Sofyan menekankan bahwa PT PLN (Persero) bersama pemerintah komit untuk menjaga security of supply. "Pengendalian tarif harus dilakukan dengan kontrol supply energi, tujuannya adalah agar tarif listrik tidak naik," papar Sofyan. Ia menjelaskan bahwa tarif listrik dalam dua tahun ini turun karena PLN telah melakukan berbagai efisiensi, diantaranya mengganti BBM dengan bahan bakar lainnya dan melakukan efisiensi batubara. "Kalau tidak seperti itu tarif (listrik) lompat, yang dirugikan rakyat," ungkap Sofyan. (PSJ)

Menteri Jonan :

Wujudkan Harga Listrik yang Semakin Terjangkau oleh Masyarakat



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membuka acara Pertambangan dan Energi Expo 2017 dengan tema "Energi Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Investasi Berkelanjutan" di Hotel JW Mariot Jakarta (26/9). Acara expo terdiri dari seminar dan pameran yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 26 hingga 27 September 2017. Pameran dan seminar ini diselenggarakan oleh Kementerian ESDM dalam rangka memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke 72.

Dalam sambutannya, Jonan menyatakan bahwa subsidi energi masih merupakan hot topik di Indonesia. Pemerintah terus berupaya menekan subsidi serendah mungkin tanpa membebani masyarakat. Jonan mencontohkan bahwa ada investor yang menawarkan pembangkit listrik arus laut dengan harga yang mahal, tentu saja langsung ditolak karena harga tersebut. Akan tetapi ketika investor tersebut kembali lagi dan menawarkan harga yang jauh lebih murah dibanding sebelumnya, Jonan langsung menerima tawaran dari investor.

"Tujuannya cuma satu, mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh masyarakat," ujar Jonan. Jonan menyampaikan bahwa upaya pemerintah di bidang ketenagalistrikan saat ini terdiri dari tiga pokok. Yang pertama adalah menambah kapasitas listrik 35.000 MW untuk seluruh Indonesia. Yang kedua adalah mengupayakan distribusi listrik yang merata di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga yang menurut Jonan paling penting adalah harga listrik tersebut harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. "Coba kita bayangkan kalau suatu desa tidak ada listriknya, pada suatu hari ada listriknya tapi orang tidak bisa beli, nah ini satu persoalan besar," ungkap Jonan.

Pada tahun ini sudah ada 60 kontrak IPP (Independent Power Producer) Renewable Energy yang ditandatangani. "Tahun ini sampai hari ini saya berdiri disini, sudah ada 60 kontrak IPP renewable energy yang dilakukan oleh PLN, klo bapak lihat disitu 2014, 2015, 2016 tarifnya jauh lebih tinggi tapi yang kontrak sedikit," ujarnya.

Jumlah daya IPP yang sudah melakukan kontrak tahun ini adalah 723 MW dan apabila ditambah dengan IPP panas bumi besarnya mencapai 1 GW. Jonan juga menambahkan bahwa pada bulan Oktober nanti akan ada penandatanganan lagi IPP renewable energy dengan daya sekitar 200 hingga 300 MW.

Menurut Jonan, pemerintah sangat mendorong renewable energi. Dan telah berkomitmen 23% untuk bauran energi Indonesia pada tahun 2025 yang terbagi pada sektor transportasi, listrik, dan lainnya. "Kalau untuk kelistrikan walaupun tidak mudah, saya yakin bisa," tutup Jonan. (UH)

Ini Upaya Pemerintah dalam Pemerataan Listrik Perdesaan

Pemerintah berkomitmen melakukan upaya terbaik guna pemerataan listrik perdesaan demi terwujudnya energi berkeadilan. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesonono pada sebuah talkshow di salah satu stasiun televisi pagi ini, Selasa (26/9), di Jakarta. Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.500 desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses tenaga listrik. Sebagian besar desa tersebut berada di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kita lakukan upaya terbaik untuk melistriki perdesaan. Targetnya, 2500 desa tersebut terlistriki dalam rentang waktu

Kedua, bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, cara yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan pra-elektrifikasi, melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program ini tertuang dalam Peraturan Presiden 47/2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Pada tahun 2017, Pemerintah menargetkan pembagian paket LTSHE sebanyak 95.729 kepada 6 provinsi tertimur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi.



Ketiga, untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah, cara melistrikinya adalah dengan mengembangkan micro grid-off grid. Cara ini digunakan Pemerintah melalui usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 38/2016. Dengan aturan ini, masyarakat yang tinggal di desa belum berkembang, terpencil, pulau terluar atau perbatasan dapat dilistriki oleh badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi yang diberikan wilayah usaha tersendiri oleh Pemerintah.

"Program percepatan elektrifikasi di perdesaan ini memanfaatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik," pungkas Agoes. (AMH)

dua tahun, yakni 2017 hingga 2019," ujar Agoes. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam berbagai kesempatan, listrik harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang terjangkau, termasuk bagi mereka yang tinggal di perdesaan.

Guna mewujudkan cita-cita tersebut, upaya melistriki masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah melalui tiga pendekatan. Pertama, ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PT PLN (Persero). Ini dikembangkan utamanya apabila masyarakat atau beban berada di dekat sistem kelistrikan. Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi dilakukan untuk mendapatkan beban yang lebih baik.



Selenggarakan Forum Konsultasi Publik, Ditjen Gatrik Harapkan Profesionalisme BUJPTL

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Forum Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dengan tema Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 tahun 2014 tentang Tatacara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, Selasa (26/9) di Yogyakarta. Dalam acara ini, Ditjen Ketenagalistrikan ingin mendengarkan masukan terkait rancangan Permen ESDM yang ditargetkan diundangkan akhir tahun ini.

Dalam sambutan mewakili Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kepala Subdit Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Benhur, mengapresiasi peranan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik (BUJPTL) dalam penyediaan tenaga listrik. Namun Benhur berpesan bahwa BUJPTL yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga

dari konsultasi perencanaan dan pengawasan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik.

Forum yang mengundang Dinas ESDM Provinsi, Asosiasi Usaha Jasa Penunjang, dan PT PLN (Persero) ini selain membahas Rancangan Permen ESDM tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, juga membahas tentang Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan sebagai kegiatan konsultasi publik. Disamping itu, forum ini juga mempresentasikan tentang kebijakan pelaksanaan IUJPTL di Provinsi DI Yogyakarta, Hak dan Kewajiban pemegang IUJPTL, serta pemahaman penerapan standar ISO 9001, manfaat, tahapan penerapan dan pengawasannya.



Listrik (IUJPTL) dituntut untuk melaksanakan kegiatan usaha secara profesional, independen, terbuka, melayani semua pihak yang membutuhkan. "Tentu dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu serta mengacu kepada regulasi dan ketentuan yang berlaku," ungkap Benhur.

Seperti diketahui BUJPTL harus memiliki IUJPTL dengan syarat penting yang harus dimiliki sebelumnya adalah Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

Selain ajang konsultasi dan pemberian informasi teknis, kegiatan ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran atas tingkat pemahaman dan penerapan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik beserta kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Hadir sebagai narasumber kegiatan ini, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Bagian Hukum Ditjen Ketenagalistrikan, serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi DI Yogyakarta. (PSJ)

Harga Listrik di Hilir Diatur oleh Pemerintah



Kemampuan masyarakat dalam membeli listrik menjadi hal yang paling penting dalam program ketenagalistrikan, maka harga listrik di hilir diatur oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng saat memberikan paparan mengenai ketenagalistrikan dalam acara seminar Pertambangan dan Energi Expo di Jakarta, Rabu (27/9). Pemerintah terus berupaya menambah kapasitas dan jaringan listrik ke seluruh pelosok Indonesia dengan tetap memperhatikan harga listrik yang terjangkau oleh masyarakat. "Percuma sudah susah-susah (mengaliri listrik) tapi masyarakat tidak mampu membeli," ungkap Andy.

Kebijakan pemerintah di bidang ketenagalistrikan yg pertama adalah meningkatkan kapasitas dan rasio elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat, saat ini sudah mencapai 92.8 persen. Menurut Andy, apabila membandingkan rasio elektrifikasi Indonesia dilihat dari negara yang keadaan geografisnya sama yaitu kepulauan. "Mungkin yg bisa dibandingkan dengan Filipina, Filipina jauh dibawah kita, jadi rasio elektrifikasi kita di Asia sudah relatif baik," ujarnya.

Andy juga menyampaikan capaian dari program 35.000 MW. Diantaranya kapasitas pembangkit terpasang saat ini sudah mencapai 60 GW dan diharapkan tahun 2019 tercapai 87 GW. "Dari 83.000 desa kurang lebih, sekarang ini sudah 73.149 desa yang sudah terlistriki. Insya Allah sampai 2019 semua desa di Indonesia sudah terlistriki dengan baik," pungkas Andy.

Terakhir, Andy menyampaikan bahwa subsidi listrik dari tahun ke tahun terus menurun. Tentunya hal ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dimanfaatkan oleh golongan masyarakat yang membutuhkan. (UH)



Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-72, Semangat Bersatu Membangun Sektor ESDM Agar Ditingkatkan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-72 di halaman Gedung Heritage, Kementerian ESDM hari ini, Kamis (28/9). Menteri ESDM Ignasius Jonan bertindak selaku pembina upacara dengan peserta upacara dari unit eselon I di bawah Kementerian ESDM. Upacara yang sedianya dilangsungkan pukul 07.30 ini mesti mundur menjadi pukul 09.00 karena terkenda hujan deras.

Sebelumnya Menteri Jonan menyampaikan sambutan dalam Puncak Pekan Pertambangan dan Energi ke-72 di Ruang Sarulla, Gedung Kementerian ESDM. Turut hadir dalam acara ini para mantan Menteri Pertambangan dan Energi/ESDM termasuk di antaranya adalah Subroto, Purnomo Yusgiantoro, Darwin Zahedy Saleh, dan Sudirman Said. Jonan mengutip pernyataan Profesor Subroto - mantan Menteri Pertambangan dan Energi pada 1978-1988 - yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan ulang tahun Pertambangan dan Energi ini adalah yang terbesar.

"Sebenarnya acara ini bisa kecil, bisa besar. Namun mudah-mudahan kalau setiap tahun diadakan proporsional, semangat bersatu membangun sektor ini menjadi lebih baik," ujar Jonan. Didampingi Wamen ESDM Arcandara Tahir, Jonan lalu memotong tumpeng dan menyerahkannya pada pegawai termuda ESDM dan para senior pendahulunya di bidang pertambangan dan energi.

Dalam konferensi pers setelah upacara, Menteri Jonan menyampaikan capaian sektor ESDM hingga September 2017. Di subsektor ketenagalistrikan, rasio elektrifikasi di Indonesia per September 2017 sudah mencapai 93,08%. Angka ini sudah melebihi target di 2017 sebesar 92,75%. Upacara pada pagi hari ini merupakan bagian dari Pekan Pertambangan dan Energi ke-72 yang pada tahun ini mengangkat tema "Energi Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Rakyat".

Rangkaian acara dalam Pekan Pertambangan dan Energi sudah dimulai dari pekan kedua bulan September 2017 hingga puncak perayaan dengan pada 30 September 2017.

Acara IndoEBTKE Conex 2017 menjadi acara publik pembukaan Pekan Pertambangan dan Energi. Acara ini diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta, 13-15 September. Selanjutnya, ada kegiatan Temu Netizen ke-7 dan kegiatan eksplorasi Museum Geologi di malam hari yang diselenggarakan pada 22-23 September 2017.

Tidak berhenti disitu, kegiatan sosialisasi untuk masyarakat umum terus dilakukan melalui kegiatan "Pertambangan dan Energi Expo 2017". Berlokasi di Ballroom JW. Marriott Jakarta pada 26-27 September 2017, acara bertema "Energi Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Investasi Berkelanjutan" ini menghadirkan pembicara para ahli pertambangan dan energi di Indonesia. Sosialisasi sektor listrik juga menjadi rangkaian Pekan Pertambangan dan Energi melalui kegiatan Pameran dan Seminar Hari Listrik Nasional selama 28 - 30 September 2017.



Kemeriahan menyambut Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-72 juga diisi dengan kegiatan penanaman pohon oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian ESDM pada 18 September 2017. Untuk mengenang jasa pahlawan yang memberikan andil besar di bidang pertambangan dan energi, Menteri Jonan bersama para keluarga Alm. Arie Lasut dan jajaran pejabat di lingkungan Kementerian ESDM melakukan ziarah ke makam Arie Frederik Lasut, Pahlawan Nasional yang merupakan

Bapak Pertambangan Indonesia, di Yogyakarta pada 22 September 2017.

Sebagai penghargaan kepada stakeholders sektor energi, Pekan Pertambangan dan Energi juga menyelenggarakan Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto pada 27 September 2017. Puncak acara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ditandai melalui penyelenggaraan upacara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-72 pada Kamis, 28 September di Kantor Kementerian ESDM yang dilanjutkan dengan pembagian santunan dan kegiatan kebersamaan. (AMH)

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Hadiri Rangkaian the 35th AMEM 2017



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Alihuddin Sitompul menghadiri pertemuan The 35th ASEAN Ministers' Meeting (AMEM) & its Associated Meetings yang diselenggarakan di Pasay City, Manila, Filipina dari Senin (25/09) sampai Jum'at (29/09). AMEM merupakan gelaran tahunan antar menteri energi ASEAN dengan mitra wicara dan organisasi internasional yang relevan.

Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman memimpin delegasi Indonesia. Selain didampingi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, ia juga didampingi Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, dan wakil dari unit kerja terkait Kementerian ESDM, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN (KSEA)-Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero).

Pertemuan pimpinan energi negara-negara ASEAN ini dipimpin dan dibuka oleh Menteri Energi Filipina, Secretary Alfonso G. Cusi. Dalam sambutannya, Cusi menekankan pada dua isu besar yang dihadapi oleh negara-negara di regional ASEAN yakni, pengurangan jejak (emisi) karbon dan realita global dibidang energi yang niscaya tidak dapat dihindari.

Pengurangan emisi karbon ini sesuai dengan target dokumen ASEAN Partnership on Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025 dimana target energi terbarukan dalam bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 dan juga sesuai dengan Blue Print Pengelolaan Energi Nasional yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia. Sedangkan realita global dibidang energi yang disampaikan oleh Cusi adalah pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangunan di regional ASEAN, dimana tren ke arah sumber energi yang ramah lingkungan, bersih dan berkelanjutan menjadi keniscayaan bagi seluruh negara di kawasan ASEAN.

Pemanfaatan energi terbarukan di ASEAN makin didorong dengan turunnya harga produksi pembangkitan EBT. Cusi menyatakan bahwa EBT merupakan pilihan yang layak secara komersial, berkelanjutan dan terjangkau.

Selain itu, Cusi juga menyatakan bahwa liquified natural gas (LNG) atau gas bumi merupakan second energy revolution yang menjadi opsi penting bagi negara-negara ASEAN dalam transformasi dari penggunaan energi fosil yang tidak terbarukan ke arah energi terbarukan. Peningkatan pemanfaatan LNG didorong oleh tiga faktor, yaitu peningkatan konsumsi di Asia, peningkatan produksi yang signifikan dari negara yang sebelumnya net-importir gas menjadi net-eksportir gas, serta turunnya harga gas dunia. ASEAN harus dapat memanfaatkan tren LNG tersebut dengan meningkatkan interkoneksi infrastruktur gas regional dan meningkatkan produksi LNG regional dari 25 million tonnes of oil equivalent (MTOE) ke 50 MTOE pada 2020. Cusi menutup sambutannya dengan kenyataan bahwa rencana-rencana tersebut memerlukan modal yang tidak sedikit dan mengajak para mitra wicara ASEAN dan semua pemangku kepentingan untuk bergabung dan berinvestasi di regional ASEAN.

Pada pertemuan AMEM ke-35 ini juga diselenggarakan acara ASEAN Energy Business Forum dimana sesi hari pertama ini ditutup dengan seremoni penghargaan ASEAN Energy Awards 2017. Indonesia menyabet 14 penghargaan pada ajang bergengsi ini yang bertujuan untuk memberi pengakuan terhadap best practices dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pemanfaatan dan pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi. Pada kesempatan ini delegasi Indonesia mengucapkan selamat kepada para pemenang dan terus mendorong para pemenang untuk mempertahankan apa yang sudah diraih dan untuk dapat terus meningkatkannya. (BAPLA)

Kebijakan Tata Kelola Ketenagalistrikan

Untuk Listrik Semakin Efisien, Merata, dan Terjangkau

Pemerintah berupaya menghasilkan kebijakan tata kelola ketenagalistrikan yang menjadikan listrik semakin efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi saat menyampaikan paparan dalam seminar bertajuk Struktur Kebijakan dan Peraturan Ketenagalistrikan, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (29/9).

Hendra menjelaskan ada tiga cara yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan akses masyarakat terhadap listrik, yakni ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui PT PLN (Persero), memberikan pra-elektifikasi bagi masyarakat yang tinggalnya tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, serta mengembangkan micro grid-off grid untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mendorong fairness antara PLN dengan Independent Power Producer (IPP). Hendra menuturkan, dukungan regulasi bisnis menjadi perhatian Menteri ESDM Ignatius Jonan, yakni bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban baik PLN maupun IPP. Dalam aturan ini, ada mekanisme take or pay untuk PLN dan delivery or pay untuk IPP. Sebelumnya, mekanisme yang diatur hanya take or pay.

"Di energi primer kita juga atur gas bumi, sehingga di sisi hilir harga listrik akan terjangkau, termasuk nanti pembangkit energi baru terbarukan (EBT) juga demikian. Polanya kita dekatkan dengan persentase biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik setempat. Regulasi ini cukup ampuh menurunkan BPP, dan IPP juga lebih efisien," lanjutnya.

Pemerintah juga meminta PLN untuk melakukan efisiensi bukan hanya di sisi pembangkit dan transmisi, tetapi juga di sisi administrasi. Dengan efisiensi, diharapkan BPP akan turun sehingga tarif listrik bisa turun. Hendra juga menyampaikan penyederhanaan perizinan di sektor ketenagalistrikan yang sebagian besar sudah dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kebijakan pemerintah lainnya adalah subsidi listrik tepat sasaran. Subsidi hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Namun, Hendra mengingatkan, pemerintah juga tetap memberikan subsidi bagi industri kecil, bisnis kecil, dan sosial. Untuk menjunjung asas transparansi dan fairness, Ditjen Ketenagalistrikan membuka posko pengaduan masyarakat yang dilakukan secara online dan buka 24 jam per hari. Hingga saat ini, ada sekitar 120 ribu pengaduan yang diselesaikan secara bertahap, termasuk ada yang sudah masuk verifikasi oleh Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Semoga program pemerintah untuk melistriki rakyat, termasuk mendukung industri, dapat berjalan lancar," pungkas Hendra.

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Listrik Nasional ke-72 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Dalam seminar ini juga ada paparan dari Tumiran (anggota Dewan Energi Nasional), Sudjoko Harsono (Direktur Bioenergi Kementerian ESDM), dan Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan). (AMH)



Dirjen Gatrik Dampingi Menteri ESDM Tinjau Proyek PLTB Sidrap

Dirjen Ketenagalistrikan (gatrik) Andi Noorsaman Sommeng, mendampingi kunjungan kerja Menteri ESDM Ignasius Jonan, Sabtu (30/09) ke Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) yang berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang/Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. PLTB Sidrap ini merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi primer dari angin.

Berdasarkan hasil studi DANIDA Denmark, terdapat tiga wilayah di Indonesia yang potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan energi angin, yaitu Provinsi DI Yogyakarta di Jawa, dan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya perusahaan UPC Renewables asal Amerika Serikat bekerjasama dengan Binatek Energi Terbarukan mengembangkan PLTB Sidrap berkapasitas 75MW dengan 30 turbin yang masing-masing berkapasitas 2,5MW.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Rusdi Masse, Bupati Sidrap mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Sidrap dan menyambut gembira pemanfaatan energi angin yang ada di Sidrap. Sidrap selain lumbung beras Provinsi Sulawesi Selatan, kini juga dapat dianggap sebagai lumbung energi baru, yaitu angin. Rusdi mengharapkan dengan adanya PLTB ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mewujudkan kemandirian energi. "Keberadaan investasi PLTB senilai 1,5T rupiah sekaligus yang pertama di Indonesia, akan menambah daya ungkit sektor pembangunan," ungkap Rusdi.

Bupati Sidrap juga mengapresiasi masyarakat setempat yang mampu menciptakan suasana nyaman untuk investor dan penerbitan administratif ijin dapat selesai tepat waktu. Demikianpun perihal sosialisasi dan pembebasan lahan serta pelibatan masyarakat secara langsung berlangsung lancar dan aman. Rusdi menjamin Pemkab Sidrap siap mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berenergi angin di Sidrap yang potensinya sekitar 350 MW.

Ia juga mendorong pengembangannya ke tahap II dimana masyarakat pemilik lahan yang sudah tahu manfaatnya, sudah menyatakan setuju. Bahkan Rusdi mengungkapkan bahwa ijin untuk pengembangan tahap II sudah ia tandatangani.

Ignasius Jonan, mengapresiasi dukungan Bupati Rusdi Masse. Jonan bercerita bawa saat ia masih Menteri Perhubungan sekitar dua tahun lalu, istri Bupati Rusdi Masse merupakan anggota DPR RI yang merupakan mitra Kemenhub, pernah bercerita tentang PLTB tersebut. Saat itu Jonan tidak tertarik karena bukan domain bidangnya.



Warta Kita

Namun sekarang sudah menjadi tugasnya selaku Menteri ESDM. Jonan mengungkapkan bahwa PLTB ini adalah yang pertama di Indonesia, dan salah satu dari negara di Asia yang telah memiliki. Jonan juga mendukung pengembangan fase II yang disampaikan Bupati Rusdi. Jonan menambahkan, Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan berbagai energi primer, baik hidro, surya, panas bumi, gas, batubara dan lain-lain yang tersedia secara lokal di masing-masing daerah yang kalkulasinya paling efisien dan efektif. Di Sidrap kecepatan rata-rata angin mencapai 7,0 - 8,2 m/s.

Jonan menegaskan posisi Pemerintah bahwa tarif tenaga listrik harus terjangkau. Bahkan dengan bercanda, Jonan mengungkapkan bahwa bisa tertidur jika investor mengajukan harga yang tidak cocok, dan segera terbangun saat mendengar harganya cocok. "Harganya pakai sistem scaling down, dengan rata-rata 11,41 USD Cent per kWh secara flat," ungkap Jonan. Ia menyatakan akan mengakomodasi sampai hitungan Biaya Pokok Produksi (BPP) melalui regulasi. Jonan mempersilakan investor masuk sepanjang tarifnya masuk akal.

Misal BPP Kabupaten Selayar akan berbeda sendiri karena geografisnya yang terpisah dari grid Sulsel, namun kalau Sidrap akan ikut BPP Sulsel. Selain itu Jonan mengingatkan core investment saja yang akan tetap dihitung, dan bukan perangkat pendukung yang telah ada untuk pengembangan fase II.

Jonan mengakui target 23% Total Primary Energy Supply (TPES) tidaklah mudah dicapai tapi harus diusahakan. Jonan mendorong pemanfaatan transportasi listrik yang mulai tersedia di pasaran. Jonan juga mengapresiasi upaya UPC Renewable untuk secara aktif melibatkan masyarakat setempat. Proyek PLTB Sidrap mendukung pemanfaatan komponen lokal dengan menggunakan 40% TKDN. Proyek PLTB ini rencananya akan COD pada kuartal I tahun 2018.

Perkembangan saat ini sudah penyelesaian konstruksi pondasi dan mulai pemasangan turbin.

Dalam dialog dengan wartawan, Jonan menyampaikan bahwa PLN sudah menyiapkan saluran transmisi dan jaringan distribusi ke masyarakat. Sekali lagi Jonan menekankan bahwa listrik itu harus murah dan idealnya terjangkau oleh daya beli masyarakat. "Pemerintah Indonesia berusaha keras agar makin lama tarif tenaga listrik makin terjangkau dan tidak terpengaruh inflasi kenaikan energi primer. Kalau tidak bisa turun, minimal stabil," tegas Jonan.

Menteri Jonan didampingi Dirjen Gatrik Andi N Sommeng, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Bupati Rusdi Masse, anggota Komisi VII DPR-RI, anggota DEN dan seluruh tamu undangan selanjutnya meninjau salah satu tower PLTB.



Catatan:

Ada peristiwa unik yang terjadi saat Menteri ESDM Jonan menyampaikan pidatonya. Jonan tiba-tiba terdiam yang membuat para undangan sempat kebingungan. Jonan terdiam sekitar 4 menit. Saat Jonan kembali melanjutkan pidatonya, ia berpesan, agar tolong diberitahu kepada tenaga asing UPC Renewable alasan mengapa Jonan tiba-tiba terdiam sejenak. Usut punya usut, Jonan terdiam karena mendengar adzan berkumandang dari masjid yang terletak dekat dengan Camp Porta lokasi acara.

Dalam ajaran Agama Islam, memang disunnahkan untuk menghentikan aktivitas saat terdengar adzan dan bersiap untuk melaksanakan Shalat. Jonan sebagai pejabat yang beragama kristiani sangat memahami nilai toleransi beragama. (RBS)

Dukung Penyediaan Listrik EBT,

Ditjen Gatrik Selenggarakan Sosialisasi Investasi Usaha Listrik

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Selasa (3/10) melaksanakan Sosialisasi Bidang Investasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk wilayah Indonesia bagian barat. Acara yang mengambil lokasi di Palembang ini dibuka oleh Kasubdit Perlindungan Konsumen Ridwan Dumroh mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Ditjen Ketenagalistrikan dalam meningkatkan penyediaan listrik dari energi baru terbarukan (EBT).

Dalam sambutannya Ridwan mengharapkan agar acara ini dapat menjadi media komunikasi dan ajang tukar pendapat antar pemangku kepentingan dengan pemerintah. "Indikator pertumbuhan ekonomi nasional adalah tersedianya pasokan listrik", ujar Ridwan. Oleh sebab itu Ridwan mengharapkan peran swasta dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik baik dalam skema IPC PLN maupun skema IPP.

Dalam sosialisasi ini juga Ditjen Ketenagalistrikan menyosialisasikan tentang Permen 49 dan 50 Tahun 2017 yang mengatur mengenai pokok-pokok penjualan tenaga listrik dan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik. Melalui Kasubdit Perlindungan Konsumen, Direktur Pembinaan Pengusahaan Tenaga Listrik mengingatkan agar badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk membina hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar pembangunan proyek agar terdapat keamanan dan kenyamanan lingkungan selama keberlangsungan proyek.

Acara sosialisasi ini dipandu oleh Kasubdit Hubungan Komersial Ketenagalistrikan Tri Handoko yang berlangsung secara panel dan menghadirkan para narasumber dari unsur pemerintah daerah, BKPM, PT PLN (Persero) serta Ditjen Ketenagalistrikan. Marwan Saragih mewakili Kepala Dinas ESDM Provinsi menyampaikan bahwa semenjak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda Sumsel segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Perda No. 8 Tahun 2015 yang mengatur perizinan yang selama ini berada di kabupaten/kota sejak saat itu semuanya di tarik

ke provinsi. "Penyediaan tenaga listrik yang handal juga sangat penting bagi Sumsel dikarenakan Sumsel dan DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah pada Asian Games tahun 2018," ungkap Marwan.

Dari Pemerintah Pusat, Direktur Pelayanan Perizinan BKPM Pusat Abdul Hanan menyampaikan mekanisme perizinan dibidang ketenagalistrikan. Pada paparannya ia menyampaikan bahwa BKPM berusaha menyederhanakan prosedur perizinan

sehingga dapat selesai dengan cepat dan terdapat juga program tiga jam selesai selama memenuhi persyaratan. Disisi lain Tohari Hidayat selaku Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) siap menyampaikan proyek-proyek mana saja yang bisa dijadikan investasi untuk kedepannya dan proses pengadaannya.

Sebelum dilakukan diskusi secara interaktif antara peserta dan pemrasaran, Joko Widiyanto dan Suryani mewakili Direktorat Pembinaan Pengusahaan menyampaikan pokok-pokok tentang Permen ESDM Nomor 49 dan 50 Tahun 2017. Disampaikan juga, Ditjen Gatrik selaku pemberi izin, akan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUPTL. Disampaikan oleh Suryani mengingatkan bahwa para pemerang izin wajib menyampaikan laporan berkala untuk menghindari sangsi pembekuan izin dan penggunaan mata uang rupiah dalam pembangunan infrastruktur strategis. (JFN)



Usulkan Revisi Aturan Jabatan Fungsional, Inspektur Ketenagalistrikan Selenggarakan FGD



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Selasa (3/10) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk para pejabat inspektur ketenagalistrikan baik di pusat maupun daerah. Dalam FGD ini dirumuskan usulan revisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya. Beberapa poin penting yang menjadi usulan revisi aturan tersebut diantaranya: penambahan jenjang Inspektur Ketenagalistrikan Utama, persyaratan uji kompetensi untuk setiap kenaikan jenjang jabatan, adanya unsur skill manajerial, dan hasil inspeksi yang berorientasi kepada tema penugasan.

FGD ini dibuka oleh Kasubdit Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Pamudji Slamet, mewakili Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad yang masih ada kesibukan lain. Munir sendiri hadir untuk memberikan pembekalan kepada seluruh Inspektur Ketenagalistrikan pada siang harinya.

Dalam sambutannya Munir menyampaikan bahwa Inspektur Ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan keteknikan dan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik. "Mengingat peran penting inspektur ketenagalistrikan, maka dibutuhkan inspektur dengan jumlah yang memadai dan memiliki kompetensi yang tinggi," ungkap Munir.

Saat ini Inspektur Ketenagalistrikan yang berkedudukan di Pemerintah Pusat berjumlah 53 orang dengan pendidikan Doctor 1 orang, 12 orang master, dan 40 orang berpendidikan S1.

Dari ke-53 orang Inspektur tersebut, 3 orang sedang dalam studi S2 di Perguruan Tinggi di dalam dan diluar negeri. Munir mendorong untuk meningkatkan kapasitas melalui berbagai macam diklat dan pendidikan lanjutan baik di dalam dan di luar negeri.

Pamudji menjelaskan, dalam revisi Kepmen PANRB nanti, Inspektur Pertama dan Inspektur Muda akan lebih banyak difokuskan melakukan kegiatan inspeksi lapangan dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya Inspektur Madya akan lebih diarahkan untuk melakukan analisis, evaluasi dan review terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan. "Jenjang Inspektur Utama diperlukan untuk meningkatkan kemampuan inspektur ketenagalistrikan sehingga dapat melakukan pengembangan metode inspeksi ketenagalistrikan untuk mengungkapkan fenomena, teori, pemodelan dan metode baru yang terkait dengan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan, ungkapnya. Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian ESDM Upik Jamil. Dalam presentasinya Upik menjelaskan mengenai seluk beluk aturan kepegawaian tentang Jabatan Inspektur Ketenagalistrikan. Ia juga menjelaskan mengenai penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai dan Angka Kredit. FGD ini juga mengundang perwakilan dari Biro Organisasi dan Tata Laksana kementerian ESDM yang menyampaikan materi mengenai Tata Organisasi, Peta Jabatan dan Inpassing Inspektur Ketenagalistrikan. (PSJ)

Resmikan Proyek Ketenagalistrikan di Banten, Jokowi Tidak Dengar Lagi Keluhan Byar Pet

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Dirut PT PLN (Persero) melakukan Groundbreaking Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7, 9, dan 10 (total Kapasitas 4.000 MW) di kompleks PLTU Jawa 7, Kamis (5/10). Selain itu pada saat yang sama dilakukan Peresmian PLTU IPP Banten (kapasitas 660 MW) dan peninjauan Pembangunan Coal Terminal 20 Juta Ton milik PT PLN (Persero).



Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tiga tahun lalu, setiap melakukan kunjungan ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan kurangnya listrik. "Tetapi setelah tiga tahun, tahun ini saya muter lagi, saya nggak-mendengar lagi suara-suara itu," ungkapnya. Meski mengapresiasi upaya pemerintah dan PT PLN untuk melakukan penambahan kapasitas pembangkit maupun jangkauan rasio elektrifikasi, namun Jokowi tetap meminta agar program-program pembangunan 35.000 MW diselesaikan. Proyek PLTU Jawa 7, 9, dan 10, dan PLTU IPP Banten merupakan proyek-proyek yang masuk ke dalam program 35.000 MW. Sementara pembangunan Coal Terminal 20 Juta Ton merupakan salah satu sarana pendukung untuk memperkuat

Selain menekankan nilai investasi, Jokowi menilai proyek-proyek ketenagalistrikan ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. "Tadi dilaporkan Proyek PLTU Jawa 7 menyerap tenaga kerja kurang lebih 10 ribu. Kenapa investasi itu perlu, karena menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Ini penting," ungkapnya. Dalam sambutannya ia mempersilakan dua tenaga kerja dari proyek-proyek ini untuk maju ke depan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri, kalau bisa diperbanyak dari tenaga kerja daerah setempat.

Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi yang harus dilakukan PT PLN (Persero) agar tarif listrik yang dibayar masyarakat terjangkau. "Saya titip kepada PLN masalah efisiensi. Semua biaya-biaya yang ada dicek betul. Baik yang berkaitan dengan harga batubara, biaya transportasi untuk pengangkutan batubara dari Sumatera ke Jawa, Kalimantan ke Jawa, jangan dibolak-balik, sehingga biaya transportasinya menjadi tinggi," ungkap Jokowi. "Kalau biaya sudah tinggi tidak efisien, bebannya yang menanggung masyarakat," imbuhnya.

Menteri Jonan mengapresiasi proyek PLTU Jawa 7 yang memiliki harga pembelian listrik paling murah yaitu 4,2122 sen per kwh. Dengan harga yang murah ini, diharapkan tarif listrik yang dibayar masyarakat tidak mahal. Dengan catatan PT PLN harus terus melakukan efisiensi di segala lini. Upaya efisiensi PLN juga ditunjukkan dengan pembangunan Coal Terminal 20 Juta Ton, dimana dengan terminal batubara ini dapat menghemat transportasi cost atau logistic cost pasok batubara khususnya untuk PLTU Suralaya. Turut hadir dalam groundbreaking dan peresmian proyek infrastruktur ketenagalistrikan di Banten tersebut, Dirjen ketenagalistrikan Andy N Sommeng serta para pejabat di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. (PSJ)



Narasumber Di Indonesia Bussines Forum, Dirjen Gatrik Sampaikan Progres 35.000 MW



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menjadi salah satu narasumber pada program Indonesia Bussines Forum di TVOne, Kamis (5/10) malam. Dalam program acara yang dipandu oleh Brigita Maharani tersebut Andy menyampaikan progres pembangunan pembangkit 35.000 MW.

Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa hingga tanggal 15 September 2017 dari total 37,8 GW yang akan dibangun, 773 MW (2%) pembangkit telah SLO/COD/Komisioning. Selain itu 15.266 MW (40%) telah masuk tahap konstruksi, 10.255 MW (27%) telah kontrak atau PPA belum konstruksi, 4.563 MW (12%) masuk tahap pengadaan, dan 6970 MW (19%) tahap perencanaan.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur 35.000 MW memang terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah dan PLN, antara lain: penyediaan lahan, perizinan, negosiasi harga dan PPA, penyediaan tenaga teknik yang kompeten, serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, tantangan tersebut telah dicoba dimitigasi dan diatasi oleh Pemerintah melalui upaya-upaya yang dilakukan.

Hambatan negosiasi harga dan PPA misalnya, Kementerian ESDM telah menerbitkan beberapa peraturan seperti: Permen ESDM No. 49/2017 Penyempurnaan Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; Permen ESDM No. 45/ 2017 Penyempurnaan Permen ESDM No. 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. Permen ESDM No. 50 / 2017 Penyempurnaan Kedua Permen ESDM 12/20 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Permen ESDM No. 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power).

Dengan aturan-aturan tersebut, Andy mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen mendorong efisiensi PT PLN (Persero) terkait harga pembelian listriknya. "Dengan efisiensi ini diharapkan tarif listrik terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat," ungkap Andy. Hadir dalam diskusi tersebut Direktur PT PLN Supangkat Iwan Santoso, anggota Komisi VII DPR RI Ramsong Siagian, serta beberapa pengamat seperti Said Didu, Marwan Batubara, dan Herman Darnel Ibrahim. (PSJ)

PLN Diminta Optimalisasi Penurunan Susut Jaringan



Pemerintah mengharapkan PT PLN (Persero) dapat melakukan upaya efisiensi untuk menjaga kinerja keuangannya, salah satunya melalui optimalisasi penurunan susut jaringan tenaga listrik. Demikian dikatakan Kasubdit Harga Tenaga Listrik Jisman Hutajulu dalam pembukaan "Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik" di Semarang, Kamis (5/10).

Susut jaringan adalah cerminan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong PLN untuk melakukan langkah-langkah strategis dan upaya yang nyata dalam penurunan susut jaringan. Penyediaan tenaga listrik yang efisien diharapkan dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) sehingga pada akhirnya membuat tarif listrik lebih terjangkau untuk masyarakat.

Penurunan susut jaringan berpengaruh besar terhadap penghematan. Dengan revenue requirement tahun 2017 sekitar Rp 300 triliun, maka susut sebesar 1% setara dengan Rp 3 triliun. Artinya, dengan melakukan upaya penurunan susut sebesar 1%, akan diperoleh penghematan biaya sebesar Rp 3 triliun tersebut.

"Kalau susut 1%, hemat 3 triliun. Ini baru satu tahun. Kita hitung berapa yang kita kawal. Sangat besar yang dikawal. Di tangan bapak dan ibu sekalian susut bisa ditekan," ujar Jisman dihadapan para peserta saat menyampaikan sambutan mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.

Pada tahun 2007, susut jaringan tenaga listrik besarnya masih 2 digit (11%). Dalam kurun waktu sepuluh tahun, susut jaringan tenaga listrik perlahan-lahan berhasil diturunkan. Tahun 2016 realisasi susut jaringan telah mencapai sebesar 8,70%. Saat ini Ditjen Ketenagalistrikan tengah menggodok Perdirjen terbaru untuk penetapan susut jaringan, menggantikan Perdirjen 1257 K/20/DJL.3/2013 yang berlaku selama ini.

Ditjen Ketenagalistrikan melalui instrumen penegakan hukum yaitu Penyidik PNS (PPNS), secara aktif mendukung PLN dalam upaya penurunan susut non-teknis/penggunaan listrik secara ilegal. Workshop yang dilaksanakan dua hari ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah kepada PLN dalam menurunkan susut jaringan. Workshop di Semarang merupakan pembuka dari rangkaian workshop susut jaringan yang juga akan dilaksanakan di Balikpapan, Makassar, dan Palembang pada Oktober 2017. (AMH)

Sosialisasikan Kebijakan Pelayanan Ketenagalistrikan, Masyarakat Diharap Pahami Hak dan Kewajibannya



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, PT PLN (Persero) Area Ciputat, dan Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan, Selasa (10/10). Acara yang diselenggarakan di kantor Kecamatan Pamulang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pelayanan di bidang Ketenagalistrikan.

"Harapan kami dengan sosialisasi masyarakat/konsumen dapat memahami hak dan kewajibannya termasuk hak dan kewajiban penyedia jasa," ungkap Kepala Seksi Pengaduan Konsumen Ketenagalistrikan selaku ketua panitia Yoga Dwasti Kenyo dalam sambutannya.

Selanjutnya Kepala Sub Direktorat Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan Ridwan menyampaikan Sambutan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Dalam sambutannya Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mengungkapkan bahwa ketentuan di UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pelaku usaha ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik sesuai dengan standar mutu dan keandalan yang berlaku. "Selain itu konsumen juga berhak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik," ujar Ridwan. Diterapkannya tarif keekonomian menurut Ridwan menjadikan PLN sebagai pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik diharuskan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

Salah satu Key Performance Indicators yang digunakan untuk mengukur pelayanan konsumen adalah Tingkat Mutu Pelayanan yang terdiri atas 13 indikator yang antara lain mengatur mengenai kualitas tegangan, frekuensi, pemadaman listrik, penyambungan pelanggan baru, dan perubahan daya serta keakuratan pencatatan pemakaian kWh meter pelanggan. "Pemerintah sebenarnya mengharapkan agar keseluruhan indikator TMP tersebut dapat dijadikan indikator pinalti namun dikarenakan kemampuan PLN yang masih terbatas, kebijakan pinalti diberlakukan secara bertahap," tegas Ridwan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, jumlah indikator pinalti menjadi enam yaitu lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya TR, kesalahan pembacaan kWh meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah. Selain itu, besaran pengurangan tagihan listrik TMP menjadi 35% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan yang dikenakan Tariff Adjustment (non subsidi) dan 20% dari biaya beban/rekening minimum untuk pelanggan tarif subsidi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, jumlah konsumen yang mendapatkan kompensasi TMP pada tahun 2015 sebanyak 7,5 juta dengan total kompensasi sebesar Rp. 79 Milyar dan kompensasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 29,7 Milyar untuk 3,6 juta konsumen. "Pemerintah berharap dengan semakin meningkatnya pelayanan PLN, maka jumlah pelanggan yang diberikan kompensasi TMP akan terus menurun," ungkap Ridwan. (PSJ)

Kementerian ESDM Dorong Transformasi Teknologi Ketenagalistrikan



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng menjadi pembicara inti pada Seminar Nasional 3 Gatrik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok, Kamis (12/10). Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Teknik Tenaga Listrik - Elektro (Gatrik) Universitas Indonesia dengan mengangkat tema: "Transformasi Teknologi Ketenagalistrikan"

Dirjen Gatrik mengapresiasi acara Seminar ini mengingat saat ini Kementerian ESDM tengah berupaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi di sektor ketenagalistrikan yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan harga listrik yang terjangkau.

Andy juga menjelaskan tiga trend utama yang akan bertemu menjadi satu dan mengubah sistem ketenagalistrikan, yaitu: Electrification, Decentralization, dan Digitalization. Perkembangan ke-tiga trend teknologi tersebut diprediksikan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang lonjakan teknologinya akan meningkat tajam sekitar tahun 2025, dan selanjutnya berkembang pesat mengikuti teknologi yang telah ada sebelumnya, seperti telepon, radio, kulkas dan TV untuk mencapai penetrasi 80% pasar. "Perkembangan atas tiga trend teknologi ini harus diantisipasi dan dipersiapkan secara dini oleh sektor ketenagalistrikan," ungkap Andy.

Selanjutnya Andy juga menjelaskan tentang "Energy Trilemma" atau tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengelola energi, yaitu: Energy Security, Energy Equity, Environmental Sustainability. Energy Security, menurut Andy adalah bagaimana kita dapat menciptakan pengelolaan pasokan energi primer yang kita miliki dan energi dari luar secara efektif, menjaga keandalan infrastruktur energi dan kemampuan untuk memenuhi demand saat ini dan masa depan. Sedangkan Energy Equity adalah menciptakan accessibility dan affordability pasokan energi untuk seluruh masyarakat. Sementara itu Environmental Sustainability adalah menciptakan pemanfaatan energi secara bersih dan ramah lingkungan seperti antara lain, pengembangan energi terbarukan dan sumber rendah carbon lainnya, dan efisiensi di sisi supply and demand.

Penerapan "Energy Trilemma" dilakukan dengan cara penambahan kapasitas pembangkit, distribusi yang adil, harga listrik terjangkau, dan dapat diterima masyarakat secara andal, berkualitas dan ramah lingkungan. "Transformasi teknologi ketenagalistrikan akan berkembang dengan sangat cepat, untuk itu semuanya harus dapat mempersiapkan diri agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat," ungkap Andy.



Hadir dalam acara tersebut Dekan Fakultas Teknik UI Dr. Dedi Priadi, Ketua Dewan Pembina Kagatrik UI Ir MSc, beberapa guru besar, dosen, dan mahasiswa Teknik Elektro UI. Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa saat ini teknologi baterai untuk kendaraan listrik semakin maju, hanya saja harganya belum cukup murah. Ia berpesan bahwa perlu sinergi antara riset yang dilakukan perguruan tinggi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga harga baterai semakin murah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan salah satunya kendaraan listrik. Andy menyambut baik usulan tersebut dan berharap agar hasil dari seminar ini disampaikan kepada pemerintah agar dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan di sektor ketenagalistrikan.(PSJ)

Turunkan Susut, Ditjen Gatrik Titipkan Tiga Pesan Ini ke PLN



Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan terus menitipkan tiga pesan untuk dilakukan PT PLN (Persero). Ketiga pesan tersebut ialah terpenuhinya pasokan listrik, kemudahan akses listrik, dan harga listrik yang terjangkau oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi saat membuka Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik, Kamis (12/10) di Balikpapan. Pemerintah sangat memberikan perhatian pada upaya menekan tarif agar terjangkau oleh masyarakat salah satunya dengan meminta PT PLN (persero) agar menurunkan susut listrik. Karena dengan menurunkan susut jaringan tenaga listrik, akan terjadi penghematan di PLN.

"Satu persen penurunan susut sebanding dengan penghematan sebesar tiga triliun", ujar Hendra.

Diakhir sambutannya Direktur Pembinaan Pengusahaan menyampaikan bahwa sampai dengan semester I tahun 2017, masih terdapat 12 area dan 115 rayon yang masuk kategori hitam karena susutnya diatas 13%, serta 25 area dan 125 rayon masuk kategori merah. Disampaikan pula apabila rayon dan area yang masuk kategori hitam dan merah dapat menurunkan susut menjadi dibawah 10%, maka susut jaringan nasional akan turun signifikan.

Pada hari pertama workshop ini, David Silalahi selaku Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi menyampaikan materi terkait kebijakan dan regulasi. Disampaikan bahwa sesuai UU Nomor 30 Tentang Ketenagalistrikan tertulis pembangunan ketenagalistrikan menganut banyak asas, salah satunya adalah asas efisiensi berkeadilan yang dapat diartikan harus ada keseimbangan antara konsumen dan penyedia listrik. "Guna mendapatkan keseimbangan itu diharapkan susut jaringan dapat dikelola dengan wajar dan optimal serta efisien agar dapat menjadi komponen penghitung tarif yang menguntungkan kedua belah pihak" ujar David.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan juga mengambil bagian dalam penurunan susut non teknis. Hal ini dikatakan Elif Doka selaku PPNS Ketenagalistrikan pada sesi berikutnya. "Penggunaan listrik yang bukan haknya atau pencurian listrik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya susut tenaga listrik" kata Elif. Dengan melakukan penindakan berupa penyidikan dan penyelidikan kepada pengguna listrik secara illegal diharapkan dapat membuat efek jera bagi konsumen untuk melakukannya kembali. Menurut Elif hal ini dikarenakan apabila konsumen diketahui menggunakan listrik secara illegal, maka mereka cenderung melakukannya lagi, karena denda yang dibayarkan tidak terlalu signifikan. Diharapkan dengan dihadapkan ke ranah pidana konsumen akan berfikir ulang bila untuk menggunakan listrik secara illegal, dan susut non teknis dapat berkurang.

Workshop yang berlangsung dua hari ini menjadi bagian yang kedua dari empat kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya di Makassar dan Palembang (JFN)

Undang Dinas ESDM, Ditjen Gatrik Selenggarakan Workshop Penyiapan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mulai hari Minggu (15/20) hingga Jumat (20/10) menyelenggarakan Workshop Penyiapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) di Ibis Style Hotel Bogor. Peserta workshop ini adalah perwakilan Dinas ESDM/Pertambangan dan Energi atau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Acara dibuka dengan sambutan Dirjen Ketenagalistrikan yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul, Senin (16/10). Dalam sambutannya Alihuddin menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).

"RUKD disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," ungkap Alihuddin.

Selanjutnya ia menyampaikan bahwa pedoman untuk penyusunan rencana umum ketenagalistrikan (RUKN dan RUKD) telah ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Diharapkan dengan terbitnya Permen ini dapat tercipta keselarasan dalam perencanaan ketenagalistrikan, termasuk konsistensi materi dan keseragaman sistematika penyusunan RUKN oleh Pemerintah dan RUKD Provinsi oleh Pemerintah Daerah.



Alihuddin menegaskan, perencanaan pembangunan ketenagalistrikan daerah yang dituangkan dalam RUKD seyogyanya dilakukan oleh Pemda setempat. "Mengingat Pemda yang lebih mengetahui kebutuhan tenaga listrik, potensi energi primer, dan perencanaan pengembangan daerahnya," ujarnya. Diharapkan dengan hal ini, arah pembangunan setiap daerah, mulai dari aspek perencanaan hingga implementasinya, dapat berjalan secara sinergis dan berkesinambungan melalui peran aktif dari Pemda setempat.

Selanjutnya Alihuddin berpesan agar perencanaan ketenagalistrikan memperhatikan keseimbangan antara demand dan supply untuk menjaga kualitas sistem tenaga listrik. Terakhir Alihuddin berharap agar Pemerintah Daerah memberikan ruang bagi infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit, transmisi, gardu induk, dan sistem distribusi. "Sehingga diharapkan RUKD dapat menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," ungkap Alihuddin. (PSJ)



Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi di Sektor Ketenagalistrikan

Pemerintah tetap mendorong gas bumi untuk lebih dapat dimanfaatkan. Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah telah menargetkan bahwa bauran energi primer untuk listrik dan non-listrik untuk gas bumi adalah minimal 22% dari 400 MTOE pada tahun 2025 dan selanjutnya meningkat menjadi 24% dari 1.000 MTOE pada tahun 2050. Dengan demikian, maka porsi gas bumi dalam bauran energi primer nasional harus dijaga pada level 22% s.d. 24% pada tahun 2025 hingga tahun 2050. Demikian dikatakan Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng saat menjadi salah satu keynote speaker dalam Seminar "LNG to Power", Senin (16/10), di Hotel Kempinski Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesian Gas Society (IGS) untuk membahas tantangan dan peluang liquefied natural gas (LNG) di Indonesia.

"Apabila kita melihat Neraca Gas Indonesia, permintaan gas dalam negeri diproyeksikan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, pasokan gas diproyeksikan trend-nya akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, kita lihat sumber daya alam kita, bisa tidak? Kita ubah paradigma. Dulu kita menganggap impor sebagai hal yang kurang baik, tapi ke depan kenapa tidak?" ujar Andy.

Kementerian ESDM senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang diproyeksikan kebutuhannya semakin meningkat, dengan melakukan antara lain adalah tidak memperpanjang kontrak ekspor gas yang telah berakhir kontraknya. Ini karena pasokan domestik meningkat setiap tahun sementara pasokan untuk ekspor menurun setiap tahunnya. Berdasarkan data pemanfaatan gas tahun 2017, porsi terbesar pemanfaatan gas adalah untuk ekspor, yaitu sekitar 28% dari total demand gas; dan diikuti oleh sektor industri yang memanfaatkan gas sebesar 23,53%. Adapun pemanfaatan gas terkecil adalah gas kota yang memanfaatkan hanya 0,05% dari total demand gas.

Andy melanjutkan, jika kita melihat dari sisi infrastruktur gas, saat ini infrastruktur gas telah berkembang dengan baik di wilayah barat Indonesia, sedangkan untuk kawasan timur infrastruktur gas masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM tengah merencanakan pengembangan infrastruktur gas di kawasan timur Indonesia hingga tahun 2030.

Hal lain yang menjadi perhatian serius dari Kementerian ESDM harga listrik untuk masyarakat harus terjangkau (affordable), sehingga biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan tenaga listriknya harus kompetitif.

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017, dimana peraturan ini menjamin ketersediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG; memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas untuk pembangkit listrik; dan memberikan privilege pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead) melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum.

Di akhir paparannya Andy mengharapkan seminar "LNG to Power" ini dapat menghasilkan terobosan atau memberikan masukan kepada Kementerian ESDM dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang lebih memajukan sektor ketenagalistrikan dan sektor minyak dan gas bumi ke depan secara lebih seimbang, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (AMH)

Kunjungi Wilayah Usaha di Gresik, Dirjen Gatrik Pesan Pertahankan Keandalan Pembangkit

Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng didampingi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi mengunjungi kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) di Gresik Jawa Timur, Selasa (17/10). Kawasan industri yang terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kawasan industri yang berluas sekitar 3.139 hektar, saat ini telah selesai membangun PLTMG berkapasitas 3x7,65 MW untuk mencukupi kebutuhan tenaga listrik pada tahap awal. Kawasan yang juga memiliki fasilitas pelabuhan ini ke depan juga akan menambah kapasitas pembangkit dengan membangun PLTG 500 MW.

Tujuan kunjungan ini adalah dalam rangka melihat perkembangan perusahaan di kawasan industri tersebut. Dalam kunjungannya, Dirjen Gatrik mendapat penjelasan dari pengelola JIPE dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera selaku pengelola wilayah usaha dan pembangkit listrik. Dari keterangan pengelola diketahui bahwa biaya investasi pengembangan wilayah usaha ketenagalistrikan ini sebesar Rp 328,78 miliar (1.014 US\$/kW), dimana pasokan gas untuk PLTMG berasal dari PT PGN dengan harga 6,43 US\$/MMBTU dan Toll Fee Rp 750/m³ (setara 8,1 US\$/MMBTU), dengan SFC sebesar 7.983 Btu/kWh.

Andy berpesan kepada pengelola agar menjaga keandalan pembangkit yang ada. "Setiap tahun jika inspektur ketenagalistrikan melakukan inspeksi ke sini, saya harap kondisi keandalannya dapat dipertahankan," ungkap Andy.

Kawasan JIPE ini telah mendapatkan izin Penetapan Wilayah Usaha melalui Surat Keputusan Kepala BKPM No 8/1/PWUPTL/2016 tanggal 17 Juni 2016). Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga telah didapatkan melalui Surat BKPM Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/1/15.14/01/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016. Saat ini pembangkit listrik di wilayah usaha ini tengah mengajukan permohonan penetapan tarif melalui Pemerintah Daerah setempat.

Sesuai UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang





Dorong Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik, Ditjen Gatrik Gelar Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan

Pemerintah terus mendorong tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan efisiensi untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik yang berimbas pada turunnya tarif listrik. Penurunan susut jaringan tenaga listrik merupakan salah satu upaya PLN dalam melakukan efisiensi. Demikian dikatakan Kasubdit Harga Tenaga Listrik Jisman Hutajulu dalam sambutannya mewakili Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan saat membuka Workshop Upaya Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Listrik, Kamis (19/10), di Makassar.

"Pemerintah sangat concern terhadap penurunan susut jaringan karena potensi penghematan dari penurunan susut jaringan sangat besar," ujar Jisman.

Jisman menyampaikan penurunan susut jaringan yang signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Jika pada 2007 susut jaringan masih di kisaran 11%, pada 2016 realisasi susut jaringan telah mencapai sebesar 8,70%. Besaran susut tersebut masih memperhitungkan tambahan kWh dari rekening minimum dan kWh komisioning.

Berdasarkan pola perhitungan oleh BPK dalam pelaksanaan audit subsidi listrik tahun 2016, tambahan kWh minimum dan kWh komisioning tidak masuk dalam penjualan tenaga listrik. Untuk menghindari perbedaan pola perhitungan, sejak tahun 2017 pola perhitungan susut jaringan mengikuti pola perhitungan BPK. Untuk itu telah disusun Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 2785/20/DJL.1/2017 sebagai pengganti Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 1257 K/20/DJL.3/2013 yang berlaku selama ini. Dalam Perdirjen yang baru, PLN diwajibkan menyusun roadmap penurunan susut jaringan lima tahunan yang akan ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan. Diatur juga bahwa target tahunan yang ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan

susut jaringan tenaga listrik tahun 2017 ditargetkan sebesar 9,60%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2016, karena disesuaikan dengan pola perhitungan BPK. Sampai dengan semester I, realisasi susut jaringan yang ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan sebesar 9,57% (triwulan I sebesar 9,60% dan triwulan II sebesar 9,55%).

Di akhir sambutannya, Jisman mengharapkan workshop ini dapat mewadahi bagaimana susut tersebut diidentifikasi pada unit-unit PT PLN (Persero) terkecil - baik susut teknis maupun nonteknis - sehingga dengan mudah melakukan upaya-upaya penurunan susut.

Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi David F Silalahi dalam paparannya menyampaikan penurunan susut dapat dicapai melalui beberapa upaya, di antaranya adalah meningkatkan kualitas jaringan distribusi, penambahan trafo distribusi sisipan baru, dan meningkatkan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam workshop ini juga dihadirkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagalistrikan Suryo Utomo untuk memberikan penjelasan mengenai peran PPNS dalam menurunkan susut jaringan nonteknis.

"Penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan kasus terbanyak yang ditangani PPNS Ketenagalistrikan. Dengan penegakan hukum, diharapkan susut nonteknis dapat menurun," Suryo menjelaskan.

Workshop di Makassar ini merupakan kegiatan ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Semarang (5-6 Oktober 2017) dan Balikpapan (12-13 Oktober 2017). Workshop serupa direncanakan akan diselenggarakan di Palembang sekaligus menjadi penutup rangkaian workshop. (AMH)

Menteri ESDM Groundbreaking dan Resmikan Proyek-Proyek Kelistrikan di Nusa Tenggara

Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan groundbreaking PLTMG 350 MW tersebar di Nusa Tenggara dan meresmikan PLTU IPP Lombok Timur 2 x 25 MW yang dipusatkan di PLTMG Lombok Peaker, Ampenan Mataram, Jumat (20/10). Dalam peresmian tersebut Jonan didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno, Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, Dirut PT PLN Sofyan Basir, Sekda Provinsi NTB Rosiady Husaenie Sayuti, dan Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi.



Beberapa pembangkit yang dilakukan groundbreaking antara lain: PLTU Lombok Peaker (150 MW), PLTMG Bima (50 MW), PLTMG Sumbawa (50 MW), MPP Flores (20 MW), PLTMG Maumere (40 MW) dan PLTMG Kupang Peaker (40 MW). Sementara pembangkit yang diresmikan adalah PLTU IPP yang diperasikan oleh konsorsium Lombok Energy Dinamic.

Menteri ESDM mengapresiasi pembangunan-pembangunan pembangkit yang akan membuat kondisi sistem kelistrikan di Nusa Tenggara lebih andal sekaligus meminta PLN lebih efisien agar tarif listrik yang dibayar masyarakat tidak naik. "Dengan beroperasinya seluruh proyek ini kebutuhan listrik di NTB dan NTT tidak akan kurang, total kapasitas 350 MW apabila pelanggan yang butuh listrik 900 VA per rumah tangga akan bisa mengaliri sekurangnya 350 sampai 400 ribu rumah tangga", ungkap Jonan.

Selanjutnya Jonan menambahkan agar PLN terus melakukan efisiensi dalam jual beli tenaga listrik agar tarif listrik yang dibayar oleh masyarakat tidak mahal.

"Saya mohon kepada PLN untuk dapat memberikan contoh efisiensi terhadap investasi per MW sehingga tarif listrik tidak naik tapi turun", kata Jonan.

Menteri juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah setempat yang telah memperlancar perizinan dan pembangunan pembangkit. "Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan bapak Gubernur NTB dan NTT karena dukungan ini sangat penting untuk pengembangan listrik disini, PLTGU Lombok Peaker akan memakan waktu sampai 2019, lainnya akan selesai 2018", ujarnya.

Dalam acara ini juga dilakukan videoconference dengan Gubernur NTT dan beberapa Bupati tempat PLTMG tersebut dibangun. Beberapa kepala daerah mengapresiasi pembangunan pembangkit-pembangkit listrik yang akan dibangun di daerahnya dan mengharapkan kunjungan langsung Menteri ESDM ke daerah mereka. (PSJ)



Ini Arahan Menteri Kepada MKI Pada Peringatan HLN Ke-72

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan arahan kepada Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada acara Coffee Morning Hari Listrik Nasional ke-72, Senin (31/10). Dalam kesempatan tersebut Menteri kembali menekankan pentingnya efisiensi dan harga yang kompetitif dalam pengembangan industri kelistrikan. Tujuannya adalah agar harga listrik terjangkau.

Jonan mengungkapkan bahwa fokus pembangunan ketenagalistrikan saat ini adalah ketercukupan, keterjangkauan, dan pemerataan. Hal ini sesuai dengan tema Coffee Morning HLN ke-72 yang diangkat oleh MKI, yaitu mewujudkan catur cita ketenagalistrikan: berkecukupan, berdaya saing, berkelanjutan dan merata untuk menuju Indonesia Terang.

Menurut Menteri, Pemerintah sangat serius dalam mewujudkan harga listrik terjangkau karena tugas pemerintah adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. "Pemerintah sangat serius sekali supaya harga listrik terjangkau. Perasaan keadilan sosial oleh rakyat Indonesia harus jalan. Saya terapkan saya selama saya disini. Ini yg menurut saya sangat penting," tegasnya.

Jonan meminta PT PLN (Persero) lebih cermat lagi dalam memilih energi primer pembangkit listrik. Ia meminta pembangunan pembangkit menyesuaikan dengan potensi energi setempat. "Tujuan semua ini karena negara kepulauan, supaya bisa menggunakan energi primer yang lebih efisien," ungkap Jonan.

Dalam kesempatan tersebut Jonan menyampaikan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan energi listrik dari energi terbarukan (EBT) dengan kualitas baik dan harga yang kompetitif. Pemerintah juga berkomitmen mencapai bauran EBT 23% di tahun 2025. Selain itu Jonan juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pemanfaatan listrik untuk transportasi.

Kegiatan coffee morning ini merupakan rangkaian penutup peringatan Hari Listrik Nasional ke-72. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dan Ketua Umum MKI Supangkat Iwan Santoso. (PSJ)



Buka Diklat Asset Manajemen PLTU, Sesditjen Gatrik: Tingkatkan Koordinasi Antar Unit

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono mengamanatkan agar Pejabat Inspektur Ketenagalistrikan meningkatkan koordinasi antar unit agar kompetensi semakin meningkat. Menurut Agoes, Inspektur Ketenagalistrikan sebagai pejabat yang bertugas untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keteknikan pada usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memanfaatkan jejaring untuk meningkatkan kemampuan.

Hal tersebut dijelaskan Agoes saat membuka Diklat Asset Manajemen PLTU Batubara untuk 15 orang Pejabat Inspektur Ketenagalistrikan di PJB Academy Kampus Gresik, Jawa Timur, Senin (6/11).

Agoes berpesan bahwa diklat ini merupakan diklat yang menarik untuk diikuti oleh inspektur ketenagalistrikan. "Inspektur ketenagalistrikan perlu mengetahui kondisi sistem kelistrikan secara nyata di lapangan," ungkap Agoes. Ia juga mengatakan bahwa saat ini beberapa pejabat di Ditjen Ketenagalistrikan telah dikirim ke beberapa perusahaan kelistrikan untuk magang atau mengetahui kondisi nyata di lapangan.

Menurut Koordinator Inspektur Ketenagalistrikan Ario Panggi, diklat asset management ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan inspektur ketenagalistrikan terkait bagaimana management asset di

PLTU Batubara, yang akan bermanfaat bagi inspektur ketenagalistrikan dalam pelaksanaan tugas inspeksi teknis di instalasi PLTU Batubara. "PLTU Batubara saat ini memegang peranan I dari batubara," jelas Ario.

penting dalam ketenagalistrikan di Indonesia dimana lebih dari 50 % kapasitas pembangkit tenaga listrik di Indonesia berasal.

Menurut Ario diklat asset management PLTU Batubara ini penting bagi inspektur ketenagalistrikan, karena dalam diklat ini diperelajari tentang bagaimana sebuah organisasi secara sistematis dan berkesinambungan mengelola asset-asset PLTU untuk mengoptimalkan kinerja, mengelola risiko serta biaya sepanjang life cycle PLTU.

Diklat ini dilaksanakan di PJB Academy karena PT. PJB telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan dan menerapkan asset management pada unit-unit pemabangkitnya untuk meningkatkan kinerja pembangkit yang dimilikinya. "PJB melalui PJB academy memiliki fasilitas lengkap dan tenaga instruktur yang berpengalaman dalam asset management PLTU batubara," tambah Ario.

Menanggapi arahan Sesditjen Gatrik, Ario terus berupaya meningkatkan sinergi antara Pemerintah dengan stakeholder dibidang ketenagalistrikan. "Saya harap dapat ditingkatkan baik itu melalui kerjasama penyelenggaraan diklat maupun yang lain," ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Agoes Triboesono berpesan agar peserta mengikuti diklat dengan baik dan menanyakan kepada fasilitator hal-hal yang tidak dimengerti. Agoes juga berharap kerjasama yang sudah dibangun dengan PJB terkait pendidikan dan pelatihan ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. (PSJ)



Iklim Investasi EBT Menarik, PLN Segera Teken Kontrak Jual-Beli 9 Pembangkit Listrik EBT

Iklim investasi untuk energi baru terbarukan (EBT) masih menarik. Ini dibuktikan dengan sembilan pembangkit listrik EBT yang segera ditandatangani oleh PT PLN (Persero). Demikian disampaikan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana dalam konferensi pers bertajuk "Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan", Kamis (2/11), di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM. Sembilan pembangkit listrik tersebut terdiri dari satu Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) di Sumatera Selatan, satu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sulawesi Tengah, dan tujuh Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM) yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat.

"Apa yang kita diskusikan hari ini membuktikan bahwa iklim investasi untuk EBT masih menarik. EBT secara harga juga makin kompetitif," ujar Rida. Dia yakin capaian EBT khususnya di bauran kelistrikan nasional sesuai RUPTL 2018-2017 bisa tercapai.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Ketenagalistrikan Andy N Sommeng mengungkapkan total investasi untuk kesembilan pembangkit EBT tersebut mencapai 20,413 triliun dengan total kapasitas pembangkit mencapai 640,65 MW.

Sembilan pembangkit EBT yang segera teken perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement/PPA adalah sebagai berikut: PLTP Rantau Dadap kapasitas 86 MW, PLTA Poso Peaker kapasitas 515 MW, PLTM Cibanteng kapasitas 4.2 MW, PLTM Cikaso 3 kapasitas 9.9 MW, PLTM Tanjungtirta kapasitas 8 MW, PLTM Kincang 1 kapasitas 0.35 MW, PLTM Bakal Semarak kapasitas 5 MW, PLTM Bone Bolango kapasitas 9.9 MW, PLTM Koko Babak kapasitas 2.3 MW.



Andy menjelaskan jika PLTA Poso di Sulawesi Tengah sudah menganut Permen ESDM Nomor 50/2017 dengan masa kontrak 30 tahun dan skema kerjasama BOOT (Build, Own, Operate, dan Transfer). PLTA Poso yang dibangun secara bertahap ini diharapkan mulai beroperasi/Commercial Operation Date (COD) paling akhir tahun 2021. PLTP Rantau Dadapdi Sumatera Selatan memiliki masa kontrak 30 tahun dengan skema BOOT dan COD pada tahun 2014.

"Untuk tujuh PLTM, rata-rata paling lama COD tahun 2020, itu di Cikaso. Kincang akhir tahun ini. Tanjungtirta tahun depan. Pada tahun 2019, ada Cibanteng, Koko Babak," Andy menambahkan.

Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan harga jual beli listrik itu sudah disampaikan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan. (AMH)

Catatan Dari The 8th Asean Energy Regulator Network (AERN) Meeting



Pertemuan The 8th AERN Meeting merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan sebagai sarana bertukar pikiran maupun bertukar informasi perkembangan sektor energi antara regulator energi negara-negara ASEAN. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada Selasa (7/11) hingga Rabu (8/11) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan ini bertempat di kantor Perdana Menteri Brunei dan dibuka oleh Pengiran Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra, Deputy Permanent Secretary in Power, IT & E-Government.

Tahun ini pertemuan The 8th AERN Meeting fokus pada sektor Ketenagalistrikan, dengan tujuan bersama mewujudkan ASEAN Power Grid (APG) yang akan menghubungkan sistem kelistrikan ASEAN. Saat ini baru tiga negara yang saling terhubung jalur transmisi listriknya melalui proyek Laos Thailand Malaysia-Power Integration Project. Melalui kerjasama ini, Malaysia melalui TNB membeli listrik dari Laos dengan kapasitas 100 MW. Di masa mendatang diharapkan seluruh ASEAN dapat terhubung dalam ASEAN Power Grid untuk menuju multilateral power trading.

Untuk itu melalui AERN Working Group 1 yang diketuai Thailand, tengah disiapkan technical guidelines dalam rangka multilateral power trading. Dr. Phu Wa Nart dari Energy Regulatory Commission (ERC) Thailand menyampaikan progress penyusunan kerangka panduan untuk pengoperasian ASEAN Power Grid (APG) yang berisikan antara lain General Provision, Electricity Grid Connection, Capacity Allocation and Congestion Management, Electricity System Operation, Electricity Balancing, Exchange of Information, dan Dispute Resolution. Disamping itu, Vietnam menginisiasi AERN Working Group 2 untuk menyiapkan studi yang mencakup aspek legal dan komersialisasi multilateral power trading. Mr. Le Anh Duc, Director Power Market Development

Research and Training Centre pada Electricity Regulatory Authority of Vietnam (ERAV) melaporkan progres AERN Working Group 2. Indonesia turut terlibat dalam AERN Working Group 2 ini.

Tercatat hadir 7 negara pada The 8th AERN Meeting yang diselenggarakan oleh Brunei Darussalam selaku tuan rumah dan Chairman AERN 2016 - 2017. 3 negara lainnya yaitu Myanmar, Laos, dan Filipina tidak dapat hadir. Perwakilan negara-negara yang hadir yaitu perwakilan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. David Firnando Silalahi, Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi hadir

Perwakilan Asean Center of Energy (ACE), Septia Buntara, Technical Officer for APAEC Programme, turut hadir dan menyampaikan beberapa update hal penting pada AERN terkait dengan upaya peningkatan peran dan fungsi utama ACE sebagai think tank, catalyst, data center dan knowledge hub negara-negara anggota ASEAN, disamping fungsi-fungsi sekretariat.

The 8th AERN Meeting ini ditutup dengan serah terima kepemimpinan 'chairmanship' AERN 2015 - 2017 dari Brunei Darussalam kepada Kamboja, untuk masa kerja 2 tahun kedepan (Chairman AERN 2017 - 2019). Sedangkan Indonesia akan menjadi Vice Chairman 2017-2019, yang mendapat giliran menjadi Chairman berikutnya pada tahun 2019-2021 (DFS).

Rasio Listrik Perdesaan Ditargetkan 99,7% pada 2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk menuntaskan program listrik 2.500 desa hingga tahun 2019. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, upaya melistriki masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah melalui tiga pendekatan, yakni ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PT PLN (Persero), mini-grid off grid, dan solar home system. Diharapkan, target rasio listrik perdesaan sebesar 99,7% di tahun 2025 dapat tercapai.

Demikian disampaikan oleh Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen Ketenagalistrikan, Chrisnawan Anditya, saat menjadi pembicara dalam Renewable Energy for Indonesia 2017, Selasa (28/11), di Hotel Le Meridien, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Chrisnawan menjelaskan target dan rencana pengembangan listrik perdesaan di Indonesia. Untuk mempercepat listrik perdesaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM 38/2016. Dengan aturan ini, masyarakat yang tinggal di desa belum berkembang,

terpencil, pulau terluar atau perbatasan dapat dilistriki oleh badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi yang diberikan wilayah usaha tersendiri oleh Pemerintah. Pengembangan sistem ini lebih mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listriknya.

"Penyediaan listrik untuk perdesaan diutamakan berbasis energi baru terbarukan (EBT) dengan total kapasitas hingga 50 MW," ujar Chrisnawan.

Pemanfaatan energi setempat diupayakan mendorong penggunaan tenaga setempat sehingga perekonomian daerah dapat tumbuh dengan lebih baik. Chrisnawan mengungkapkan desa berlistrik di tahun 2016 ada sebanyak 72.141 desa. Pada 2017, ada tambahan 1.008 desa berlistrik, sehingga total desa berlistrik per Agustus 2017 adalah sebanyak 73.149 desa.

Untuk mempermudah pembangunan pembangkit listrik, Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan dari sisi tarif tenaga listrik dan penyederhanaan perizinan, maupun dari sisi dokumen perencanaan (RUPTL) dalam rangka optimalisasi rincian jadwal pembangunan pembangkit di setiap wilayah. Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk memastikan keseimbangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dengan Independent Power Producer (IPP/pengembang listrik swasta), seperti kontrak jangka panjang dan jaminan pasokan bahan bakar, untuk menciptakan peluang bisnis yang kompetitif dan memberikan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat. (AMH)



Dirjen Gatrik

Pimpin Sesi Paralel Pertemuan Indonesia – China Energy Forum 2017



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy Noorsaman Som-meng hadir pada kegiatan the 5th Indonesia - China Energy Forum 2017 (ICEF ke-5) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan Jakarta (Senin, 13 Nov 2017). ICEF merupakan forum pertemuan Pemerintah dan Pengusaha dari kedua negara yang membahas aspek kebijakan, regulasi, ekonomi dan teknologi dalam rangka pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral. ICEF dibentuk pada tanggal 24 Maret 2002 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia (Menteri Pertambangan dan Energi) dan pemerintah RRT (Menteri Geologi dan Sumber Daya Mineral).

Sebagai informasi, ICEF Ke-1 berlangsung pada tanggal 25-27 September 2002 di Bali dan Jakarta; ICEF Ke-2 berlangsung pada tanggal 27-29 Oktober 2006 di Shanghai, RRT; ICEF Ke-3 berlangsung pada tanggal 22 Desember 2008 di Jakarta; dan ICEF Ke-4 berlangsung pada tanggal 19-20 Oktober 2010 di Nanning, RRT.

Pertemuan ICEF ke-5 ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan didampingi para direksi BUMN bidang energi, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta pengusaha sektor energi di Tanah Air. Sedangkan pihak RRT dipimpin oleh Administrator National Energy Administration (NEA) RRT Mr. Nur Bekri dengan delegasi terdiri atas para pejabat di lingkungan NEA serta para pejabat dan direksi Perusahaan Tiongkok yang bergerak di Sektor Energi dan Sektor Perbankan proyek infrastruktur. Total delegasi dari RRT berjumlah lebih dari 150 (seratus lima puluh) peserta dari 30 (tiga puluh) perusahaan.

Pasca pembukaan oleh kedua Menteri, acara kemudian dibagi menjadi dua sesi paralel yang berjalan bersamaan, yakni Working Group (WG) on Oil, Gas and Coal serta Working Group on New, Renewable Energy and Electricity (WG on NRE & E). Pertemuan paralel WG on NRE & E dipimpin oleh Dirjen Ketenagalistrikan sebagai chairman dengan didampingi Mr. Zhu Ming, (DG of Department of NRE) sebagai co-chair.



Pertemuan WG on NRE & E ini dibagi menjadi tiga sesi, yakni, sesi I Renewable Energy, sesi II Electricity serta sesi III financial support. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan menjadi narasumber pada sesi ke-II.

Warta Kita

Dalam Sesi Paralel WG on NRE & E disepekat hal-hal sebagai berikut:

- Dalam bidang New & Renewable Energy, Pihak Indonesia mengundang perusahaan RRT untuk berinvestasi di Indonesia.
- Pihak RRT, melalui DG of NRE menawarkan kerjasama dalam pengembangan kebijakan, teknis dan kerjasama antar pelaku usaha.
- Pihak China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI) memberikan saran kerjasama untuk pengembangan EBT di Indonesia:
 - a) Dibentuknya Working Group (WG) yang dikhususkan bagi pengembangan EBT dibawah kerangka Dialog Energi Antara Pemerintah RRT dan Indonesia
 - b) Pemerintah Indonesia akan secara aktif mendukung keterlibatan Perusahaan-perusahaan RRT dalam mengembangkan sektor EBT dengan perbaikan pada kebijakan dan mekanisme
- Pihak RRT melalui National Energy Administration menyampaikan prinsip-prinsip kerjasama energi international yang dapat dilakukan RRT:
 - a) Inovasi, koordinasi, hijau, terbuka dan sharing,
 - b) Dimulai dengan planning (perencanaan) dan dilanjutkan dengan proyek,
 - c) Saling menguntungkan dan win-win solution.



- Arah Pengembangan ketenagalistrikan di RRT salah satunya adalah meningkatkan kerjasama internasional di industri ketenagalistrikan dan berdasarkan pengalaman dalam pengembangan ketenagalistrikan, Indonesia dapat mencontoh yang dilakukan oleh RRT seperti pengembangan Sistem ketenagalistrikan generasi terbaru dengan sifat lebih fleksibel, lebih stabil dan lebih terkontrol.
 - China Huadian mengajak untuk lebih melihat langsung teknologi yang telah dikembangkan oleh China Huadian dari pada hanya mendengar, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan oleh pihak Indonesia ke RRT.
 - PT SMI membuka kesempatan bagi investor dari RRT untuk berdiskusi perihal mengenai pendanaan proyek pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.
- Pertemuan ditutup dengan kesimpulan bahwa baik pihak RRT maupun Indonesia sepakat untuk menindaklanjuti hasil-hasil dalam forum ini dalam bentuk kerjasama yang lebih nyata.
(BAPLA)

Menteri ESDM

Serahkan Penghargaan IBEA 2017



Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan penghargaan pada pemenang Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2017 yang diselenggarakan Majalah Listrik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (23/11) malam.

Dalam sambutannya Jonan memberikan apresiasi kepada para pemenang, dewan juri dan panitia penyelenggara. Ia berharap para pemenang dapat menjadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja, khususnya dalam efisiensi, sehingga sektor ketenagalistrikan dapat lebih efisien dan tarif listrik yang dibayar masyarakat terjangkau.

"Fokus pembangunan ketenagalistrikan ada tiga," ungkap Jonan dalam sambutannya. Menurutnya prinsip kecukupan, kejangkauan, dan perhatian terhadap lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku bisnis sektor ketenagalistrikan. Untuk itu ia mengapresiasi inisiatif panitia dalam memberikan penghargaan bagi perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, pengembang energi baru terbarukan, pengelolaan lingkungan hidup, maupun CSR sektor ketenagalistrikan.

Jonan berharap acara penganugerahan Indonesia Best Electricity Award tahun 2017 yang juga dimeriahkan dengan pameran tidak hanya sebagai ajang untuk saling bertukar pikiran mengenai inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan di sektor ketenagalistrikan saja tetapi yang lebih penting lagi adalah mampu menciptakan usaha penyediaan dan penunjang tenaga listrik di Indonesia menjadi andal, efisien, berkesinambungan dan ramah lingkungan. Menteri juga berharap tahun depan penyelenggaraan kompetisi ini dapat lebih baik, lebih selektif dan kategori dapat dipadatkan sehingga benar-benar terpilih perusahaan yang terbaik di sektor ketenagalistrikan.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berpartisipasi pada pameran yang diselenggarakan dari Rabu (22/11) hingga Kamis (23/11). Dalam stand Ditje Ketenagalistrikan ditampilkan beberapa aturan terbaru di bidang ketenagalistrikan, capaian pembangunan infrastruktur, serta KIOSK layanan informasi investasi ketenagalistrikan. (PSJ)



Sesditjen Gatrik

Beri Motivasi Kepada Para Pemberi Layanan



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memberikan arahan dan motivasi pada acara training motivasi dan pelayanan prima kepada sekitar 30 pegawai Ditjen Ketenagalistrikan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Jumat (24/11).

Agoes dalam arahannya berharap para pegawai dapat memberikan pelayanan dengan ramah dan berperilaku yang baik. Ia meminta seluruh pegawai dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan berlatih berhadapan dengan orang lain dan meningkatkan pengetahuan khususnya di sektor ketenagalistrikan. "Banyak berlatih bagaimana berhadapan dengan orang lain. Yang penting dalam bekerja adalah bagaimana perilaku kita," ungkap Agoes.

Selanjutnya Sesditjen juga berpesan agar pegawai meningkatkan koordinasi dan tidak terkotak-kotak. "Kita semua adalah pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, jadi kalau ada direktur lain memberi perintah harus dilaksanakan," tegasnya.

Acara ini diselenggarakan di Senior Living Sentul Bogor dari Kamis (23/11) hingga Sabtu (25/11) dengan kegiatan seperti outbond dan pemberian motivasi dari tim instruktur ESQ. Dengan pelatihan ini diharapkan para pegawai dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi Tanti Wijayani menyampaikan bahwa kegiatan ini dikemas dengan outbond agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan gembira dan kembalinya ke pekerjaan dapat lebih segar lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rencananya pelatihan serupa akan diberikan kepada para pejabat fungsional, khususnya fungsional inspektur ketenagalistrikan dalam waktu dekat. (PSJ)

Pemerintah dan PLN Susun Peta Informasi *Geospasial* Ketenagalistrikan



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN (Persero) saat ini tengah menyelesaikan integrasi peta informasi geospasial tematik bidang ketenagalistrikan. Bulan Desember nanti, Ditjen Ketenagalistrikan akan melaporkan hasil integrasi ini untuk pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua kepada Menteri ESDM, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kantor Staf Presiden (KSP).



Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, serta mewujudkan ESDM One Map

yang menjadi salah satu program Kementerian ESDM. Data informasi geospasial yang dikumpulkan dan diintegrasikan meliputi data spasial pembangkit, transmisi, dan gardu induk, dengan skala 1:50.000.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam arahannya kepada peserta Rapat Finalisasi Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Ketenagalistrikan, Senin (27/11) menyampaikan bahwa ESDM One Map sangat penting sebab dengan aplikasi ini pemerintah dapat melihat langsung lokasi-lokasi desa yang berlistrik dan belum berlistrik.

"Para peserta saya harap dapat serius mengikuti forum ini agar data yang dimasukkan ke dalam ESDM One Map benar-benar valid," ujar Alihuddin. Forum finalisasi ini diselenggarakan di Hotel Mirah Bogor dari Minggu (26/11) hingga Selasa (28/11).

Alihuddin mengapresiasi para peserta yang berasal dari regional-regional PLN yang telah berkoordinasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan dalam menyusun peta geospasial ini. Alihuddin juga berpesan agar peserta benar-benar memahami kondisi di lapangan, serta mengetahui lokasi masing-masing infrastruktur ketenagalistrikan masing-masing regional.

Sebagai informasi pada tahun 2016 lalu telah dilakukan integrasi peta informasi geospasial tematik bidang ketenagalistrikan oleh Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta untuk pulau Kalimantan, sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan akan diselesaikan untuk pulau Jawa. (PSJ)



Ditjen Gatrik

Selenggarakan FGD Kerja Sama Energi ASEAN

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selaku focal point kerja sama energi ASEAN menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Challenges & Opportunities in ASEAN Energy Cooperation" pada 26-28 November 2017 di Hotel Salak Heritage, Bogor. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyatukan pandangan dan perspektif Indonesia terhadap tantangan dan kesempatan yang dapat dimaksimalkan oleh Indonesia pada kerja sama energi di kawasan regional ASEAN.

"Kita harus menguasai SDM. Untuk menguasai SDM, kita harus melihat peta kekuatan SDM kita dan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas agar kita bisa bermain di ASEAN," ungkapnya.

Pembicara yang hadir dalam FGD ini berasal dari Kementerian Luar Negeri, ASEAN Centre of Energy (ACE), BATAN, PT PLN (Persero), dan Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM. Badariah Yosiyana dari ACE menjelaskan blue print energi ASEAN yang dikenal dengan ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2016-2025 (APAEC).



"Harapan kita di dalam forum-forum seperti ini, kawan-kawan di working group dapat duduk di sini dan menyampaikan berbagai masalah yang perlu dibicarakan di tingkat nasional," ujar Alihuddin. Salah satu yang disoroti Alihuddin adalah mengenai sertifikasi di ASEAN. Dia lalu mencontohkan sertifikasi tenaga ahli konservasi energi yang berpusat di Thailand.

"Jadi untuk bisa mendapatkan ahli konservasi ASEAN, harus mendapat sertifikasi dari Thailand. Kalau nanti ahli konservasi Indonesia tidak mendapatkan sertifikat ahli konservasi dari Thailand, kita tidak akan bisa menjadi expert di Manila, Laos, dan lainnya. Ini harus kita siasati. Kalau ini tidak kita sikapi, maka pasar-pasar akan dikuasi oleh orang-orang yang sudah disertifikasi di ASEAN," Alihuddin menjelaskan. Untuk itu, diperlukan strategi agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia dapat bersaing di level ASEAN.

Secara garis besar, tujuan APAEC adalah untuk meningkatkan konektivitas energi dan integrasi market di ASEAN untuk mencapai keamanan, akses, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi. Ada tujuh program dalam APAEC, yakni ASEAN Power Grid, Regional Energy Policy & Planning, Energy Efficiency & Conservation, Civilian Nuclear Energy, Trans ASEAN Gas Pipeline, Renewable Energy, dan Coal & Clean Coal Technology.

"Target APAEC adalah meningkatkan komponen energi terbarukan menjadi 23% pada bauran energi ASEAN di tahun 2025," ujar Badariah Yosiyana. Selain itu, dia melanjutkan, ASEAN juga ingin mengurangi intensitas energi sebesar 20% di tahun 2020 berdasarkan level 2005. (AMH)

Perbandingan

Kompore Gas dan Kompore Listrik Induksi



Kompore induksi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1933 di Wold Fair di Kota Chicago [1]. Konon kabarnya General Motors memperagakannya dengan meletakkan koran antara alat masak dan kompore, dimana koran tidak terbakar dan airnya mendidih.

Kompore induksi ini bukanlah penemuan yang ujug-ujug timbul karena hasil pemikiran satu tim. Tapi penemuan ini memiliki rentang panjang, sama panjangnya dengan penemuan listrik. Tapi kita sebut saja beberapa penemu, untuk mengingatkan bagaimana kompore induksi ini bisa jadi barang berguna kayak sekarang.

Pada tahun 1831, seorang ilmuwan bernama Michael Faraday menemukan bahwa dua buah koil yang terikat pada besi, dimana salah satu koil disambungkan dengan sumber listrik akan menghasilkan arus sesaat pada koil yang satunya, dari sanalah prinsip erlektromagnetik bermula. Hukum Faraday menyatakan bahwa magnet yang bergerak dalam koil akan menimbulkan arus listrik pada koil tersebut. Hukum Faraday menjadi peletak dasar ilmu listrik, yang kemudian berkembang menjadi mesin-mesin listrik hingga sekarang. [2]

Michael faraday juga meneliti mengenai cahaya, tapi hubungan cahaya dan magnet tak dia temukan hubungannya, sampai seorang anak muda bernama William Thomson mengirim surat kepadanya setelah meneliti mengenai garis magnet yang dipublikasi Faraday. Anak muda tersebut kemudian menjadi professor pada Laboratorium yang berdekatan dengan Sungai Kelvin di University Glasgow.

Dari nama sungai itulah, William Thomson diberi gelar Lord Kelvin. Lord Kelvin nantinya lebih banyak meneliti mengenai termodinamika, dan dialah peletak dasar Hukum Thermodynamika I dan II. Rumus dasar kita gunakan dalam perhitungan kalor dibawah nanti tak lepas dari sumbangsihnya.[3]

Ketika mesin listrik telah ditemukan, saat itu arus listrik masih jenis arus searah. Perusahaan listrik di Amerika dikuasai oleh Thomas Alfa Edison dengan General Electricnya. Tapi listrik arus searah tak praktis dan banyak rugi-ruginya khususnya saat dihantarkan jarak jauh.

Kemudian muncullah seorang jenius bernama Nikola Tesla. Dia menantang kemapanan Edison. Pada tahun 1887, Tesla menemukan arus bolak balik. Arus bolak balik dapat ditransmisikan dengan mudah, dinaikkan dan diturunkan tegangannya dengan transformator. Dari penemuan arus bolak balik inilah, listrik dapat diproduksi dan dihantarkan secara lebih mudah dan lebih efisien. Tapi tidak itu saja, penemuan listrik bolak balik juga menghasilkan banyak peralatan listrik yang menggunakan prinsip adanya frekuensi dari listrik yang dihasilkan.

Prinsip kerja yang ditemukan Faraday, ketika digabungkan dengan penemuan Tesla menghasilkan mesin listrik statis seperti transformator. Berkat penemuan Tesla, tak perlu ada bagian yang bergerak secara kasat mata seperti generator untuk menghasilkan listrik, tapi dengan adanya arus bolak balik otomatis ada arus yang berubah terhadap waktu yang menimbulkan fluks magnetik yang berubah-ubah pula. Induksi elektromagnetik yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi listrik inilah yang menyebabkan trafo bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Prinsip yang mirip juga digunakan pada kompore induksi.

Kompore induksi di klaim memiliki keuntungan dibanding dengan kompore gas LPG. Bagaimana perbandingan antar kedua jenis kompore berbeda sumber tersebut? Artikel ini akan membandingkan biaya akhir yang dibutuhkan oleh konsumen dengan menggunakan kompore gas dan kompore induksi. Perhitungan yang digunakan adalah berdasarkan data-data yang dapat diakses melalui internet dan tidak dengan percobaan langsung. Selain itu, karena saya engineer elektro, bisa saja ada perhitungan saya terkait dengan kalor yang kurang tepat.

Kolom

Kompore Listrik

Kompore listrik yang beredar di pasaran terbagi atas dua jenis. Kompore listrik konvensional dan kompore listrik induksi. Kompore listrik konvensional menggunakan elemen pemanas yang terintegrasi dengan kompornya, elemen ini akan memanaskan dan berwarna merah ketika telah dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Dibandingkan dengan kompore listrik induksi, efisiensi kompore jenis ini lebih rendah dikarenakan adanya elemen pemanas yang harus dipanaskan dulu sebelum panas dikonduksikan ke peralatan masak. Perbandingan efisiensinya berdasarkan data US DOE adalah 74% untuk kompore listrik konvensional dan 84% untuk kompore listrik induksi.[4]

Gas LPG

Kompore gas LPG menggunakan bahan bakar LPG atau Liquefied Petroleum Gas. Di Indonesia LPG yang berada di pasaran dijual oleh Pertamina dengan merk Elpiji. Elpiji mempunyai komponen utama gas propane (C_3H_8) dan gas butane (C_4H_{10}). Berdasarkan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas nomor 26525K/10/DJMT/2009 tentang Standard an Mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dipasarkan di dalam negeri, LPG berisi campuran propan dan butane minimum 97% dari total berat. Nilai kalor dari elpiji adalah 47.089 kJ/kg.[7]

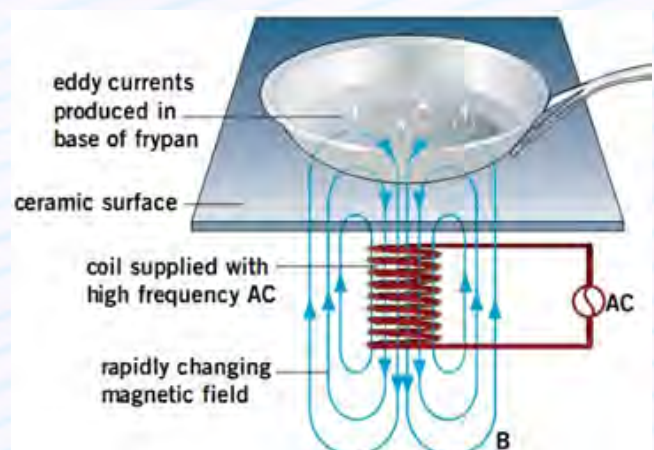


Prinsip kerja Kompore Induksi

Kompore induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, dibandingkan dengan menggunakan konduksi panas atau elemen pemanas. Kompore induksi memanaskan peralatan masak secara langsung sehingga suhu yang diinginkan dapat dicapai dengan cepat.

Prinsip dasarnya adalah koil digunakan pada bagian bawah kompore, yang kemudian dialiri arus listrik bolak-balik. Arus bolak-balik akan menimbulkan fluks magnet yang berubah-ubah menurut waktu. Sesuai dengan hukum Faraday, fluks yang berubah-ubah dan memotong penghantar akan menimbulkan arus. Arus tersebut timbul pada peralatan masak yang berbahan metal, karena adanya eddy current yang mengalir pada peralatan tersebut. Arus tersebut "terperangkap" dan menimbulkan efek panas ketika melewati tahanan [5]. Karena hal tersebut, maka peralatan masak untuk kompore induksi haruslah yang memiliki sifat magnetis, sehingga tidak bisa menggunakan yang berbahan kaca ataupun aluminium dan tembaga murni [6]. Cara terbaik untuk mengetesnya adalah dengan menempelkan magnet pada peralatan masak tersebut. Jika magnet dapat menempel, maka dapat digunakan, sedangkan jika magnet tidak menempel maka tidak bisa digunakan.

Prinsip kerja gas elpiji berbeda dengan kompore induksi. Pada kompore gas elpiji, sumber panas berasal dari pembakaran gas yang kemudian dikonduksikan melalui udara dan memanaskan alat masak. Dalam proses ini terdapat energi yang hilang menjadi panas. Prinsip kerja tersebut berbeda dengan kompore induksi dimana panas berasal dari peralatan masaknya langsung, sehingga efisiensi kompore induksi lebih tinggi dibandingkan dengan kompore gas. Namun jika dibandingkan antara bahan bakar gas dengan minyak tanah, efisiensi pembakaran gas lebih tinggi.



Gambar : Proses Kerja Kompore Induksi Listrik[5]

Metode Perhitungan[8]

Perhitungan yang digunakan berdasarkan data-data, asumsi dan rumus-rumus sebagai berikut:

1. Berdasarkan data US DOE, Efisiensi kompor gas LPG adalah 40% dan kompor induksi adalah 84%
2. Asumsi kedua jenis kompor tersebut akan digunakan memanaskan 10 liter air pada suhu awal 30 derajat celcius, sehingga untuk memanaskan 10 liter air dibutuhkan :
 - Energi = $m \times c \times \Delta T$
 - Massa air = 10 liter x 1kg/liter = 10 kg
 - Delta T = 100 – 30 = 70 derajat
 - Energi yang dibutuhkan untuk memasak 10 liter air adalah = $10 \times 4,2 \text{ kJ/kg} \times 70 = 2940 \text{ kJ}$.
3. Harga eceran 1 tabung gas elpiji 12 kg berdasarkan pengalaman kami membeli dan diantar sampai di rumah pada bulan November 2017 adalah : Rp. 158.000,-. Harga ini bisa lebih mahal untuk daerah-daerah di luar Jawa.
4. Harga listrik untuk golongan tarif R1-1300 VA keatas = Rp. 1.467/kWh
5. Tara kalor LPG = 47.089 kJ/kg.

Hasil Perhitungan

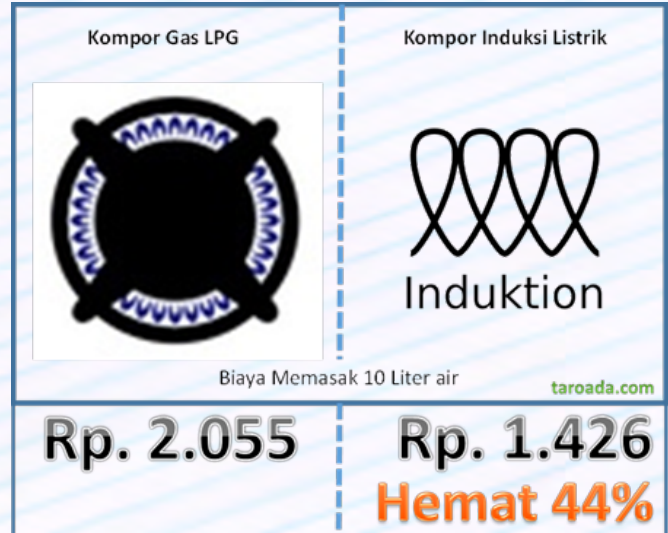
	Kompor Gas LPG	Kompor Induksi
Unit	12 kg	1 kWh
Energi (dalam Joule) per unit	$47.089 \text{ kJ/kg} \times 12 \text{ kg} = 565.068 \text{ kJ}$	3.600 kJ
Energi per unit, dengan memperhitungkan efisiensi	$565.440 \text{ kJ} \times 0,4 = 226.027 \text{ kJ}$	3.024 kJ
Jumlah unit yang dibutuhkan untuk memanaskan 10 liter air	$2.940 \text{ kJ} / 226.027 \text{ kJ} = 0,013007296$	$2.940 \text{ kJ} / 3.024 \text{ kJ} = 0.972222$
Harga per Unit	Rp. 158.000	Rp. 1.467
Biaya memanaskan 10 liter air	$158.000 \times 0,013007296 = \text{Rp. } 2.055.153$	$1.467 \times 0.972222 = \text{Rp. } 1.426.5$

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan kompor induksi dapat menghemat sampai dengan 44% dibanding dengan menggunakan kompor gas LPG.

Catatan perhitungan

- Data perhitungan sangat terkait dengan data efisiensi, karenanya jika ada riset yang menghasilkan perbedaan efisiensi akan sangat berpengaruh terhadap perbedaan perhitungan. Khusus terkait dengan gas, penggunaan efisiensi 40% adalah data yang umum digunakan pada banyak referensi. Sementara untuk data kompor induksi terdapat variasi data efisiensi antara 75-84%. Namun yang dapat disimpulkan adalah kompor induksi lebih efisien dari kompor gas.
- Gas LPG merupakan sumber energi primer, sedangkan listrik adalah energi sekunder. Gas yang digunakan pada kompor LPG dirubah langsung menjadi energi panas melalui proses pembakaran, sedangkan energi listrik merupakan energi yang dibangkitkan dari perubahan energi primer. Energi primer ini dapat berupa batu bara, minyak, gas, angin dan air. Dalam proses perubahan energi primer ini menjadi listrik tentu ada rugi-rugi yang timbul, disamping itu setelah menjadi listrik maka disalurkan melalui jalur transmisi dan distribusi dimana losses yang timbul sekitar 8% dari energi yang dibangkitkan. Perhitungan yang digunakan dalam artikel tidak memperhitungkan hal tersebut, namun tarif tenaga listrik yang digunakan dalam perhitungan ini sudah mencerminkan hal tersebut.
- Perhitungan ini juga tidak melihat perbedaan biaya pembangkitan listrik pada daerah-daerah yang masih mengandalkan pembangkit berbahan bakar minyak yang biaya pokok penyediaannya listriknya bisa lebih besar dari tarif listrik.
- Perhitungan juga belum mempertimbangkan biaya pembelian kompor induksi baru, dan peralatan masak yang baru dikarenakan peralatan masak yang digunakan pada kompor induksi berbeda dengan menggunakan kompor gas.



Referensi :

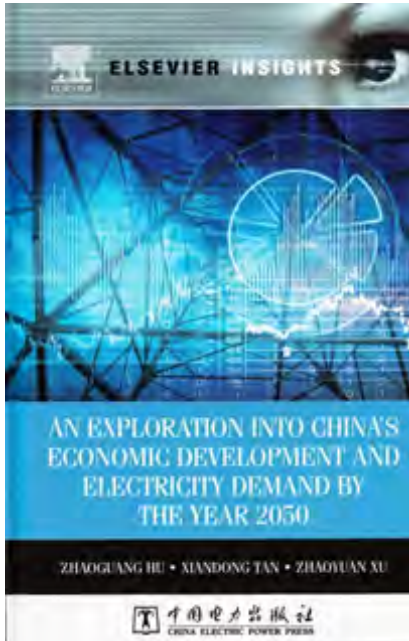
- [1] (2017, 10 Desember). The History of Induction Cooking Technology. Available: <http://bestinductioncooktopreview.org/the-history-of-induction-cooking-technology/>
- [2] L. P. Williams, "Michael Faraday," in Encyclopedia Britannica, ed: Encyclopædia Britannica, inc., 2017.
- [3] (2017, 12 Desember). William Thomson, Lord Kelvin. Available: <https://nationalmaglab.org/education/magnet-academy/history-of-electricity-magnetism/pioneers/william-thomson-lord-kelvin>
- [4] (2017, 12 Desember). Cooking. Available: <http://www.t2c.org.uk/cooking/>
- [5] A. Rasoi. (2017, 12 Desember). How Induction Cooktop Works. Available: <http://www.apanirasoi.in/Cooking/how-induction-cooktop-works/>
- [6] (2017, 12 Desember). Induction-Friendly Cookware Guide. Available: <http://www.metrokitchen.com/induction-compatible-cookware>
- [7] KESDM, "Konversi MITAN ke GAS," K. ESDM, Ed., ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Migas, 2009.
- [8] (2017, 12 Desember). Cooktop Comparison: Gas, Electric and Induction. Available: <https://www.bijlibachao.com/appliances/cooktop-comparison-gas-electric-and-induction.html>



Penulis :

Ahmad Amiruddin / Inpektur Ketenagalistrikan Muda

Resensi Buku



Judul : An Exploration into China's Economic Development and Electricity Demand by the Year 2050
Pengarang: Zhaoguang Hu; Xiandong Tan; Zhaoyuan Xu et al.
Data Terbit: 2014: Elsevier, London
Data Fisik: 23 cm, 196 hlm.

Resensi:

An Exploration into China's Economic Development and Electricity Demand by the Year 2050 merupakan studi eksplorasi pembangunan ekonomi nasional dan regional, permintaan energi dan permintaan listrik di China pada tahun 2050. Perekonomian China tumbuh dengan cepat dan sekarang merupakan ekonomi terbesar kedua. Di dalam dunia. Pada tahun 2010, PDB mencapai 40 triliun Yuan dan konsumsi listrik kedua setelah Amerika Serikat, mencapai 4,19 triliun kWh. Banyak orang mengikuti tren pertumbuhan ekonomi China yang akan datang (jangka panjang) dan permintaan listrik secara ketat dan sangat tertarik pada bagaimana pembangunan akan terlihat pada tahun 2030 dan 2050.

Berdasarkan ILE4, buku ini membahas fitur utama perkembangan ekonomi China dan konsumsi listrik sejak reformasi ekonomi tahun 1980an. Ini mencakup analisis hubungan intrinsik antara permintaan listrik dan pertumbuhan ekonomi dan perubahan kecenderungan penyesuaian struktur ekonomi, optimasi tata letak wilayah dan pengembangan industri energi intensif, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi permintaan listrik China.

Selain itu, buku ini mempertimbangkan 20 tahun ke depan perkembangan ekonomi China dan meningkatnya permintaan listrik berdasarkan simulasi rinci yang dilakukan oleh ILE4 dalam pengembangan ekonomi regional dan konsumsi listrik pada tahun 2030 serta juga perkiraan konsumsi listrik dan pertumbuhan ekonomi China di tahun 2050. Buku ini Memungkinkan pembaca ekonomi China melakukan reformasi dan membuka diri sampai tahun 2050, termasuk PDB nasional, struktur ekonomi dan ekonomi semua provinsi dan kotamadya, Memeriksa perkembangan ekonomi China dan konsumsi listrik sejak reformasi ekonomi tahun 1980an serta Mempertimbangkan konsumsi 20 tahun ke depan dan permintaan pada tahun 2050 berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh ILE4.

Penulis :

Dina Andriani, S.Hum (Pustakawan Madya)

Resensi Buku

Judul : Disruption
Pengarang: Rhenald Kasali
Data Terbit: 2017: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Data Fisik: 23 cm, 512 hlm.

Resensi:

Buku ini merupakan buku terbaru dari Pak Rhenald Kasali yang membahas khusus tentang Disruption, baik dalam skala Global maupun yang terjadi di Indonesia. Disruption. Kata-kata yang mendadak populer belakangan ini, dan kerap berkaitan erat dengan Startup.

Dalam buku ini, Pak Rhenald berusaha membedah teori Disruptive Innovation dari Clayton Christensen dan menerjemahkannya menjadi berbagai studi kasus yang lebih mudah dimengerti, terutama untuk para praktisi, walaupun memang dasar-dasar akademis juga turut diberikan sebagai dasar kerangka berpikir.

Contoh disruption yang sedang populer di Indonesia, tidak lain adalah keberadaan para angkutan online yang perlahan tapi pasti mampu menggerus laba dari angkutan tradisional seperti taxi. Pada mulanya, incumbent (dalam hal ini adalah angkutan konvensional) tentu tidak akan menyangka bahwa angkutan Online (diwakili GoJek, Grab, dan Uber) mampu membuat perubahan yang sebenarnya sangat besar, tapi tidak mendadak. Hal inilah yang seringkali membuat incumbent terlena, merasa bahwa posisinya di atas angin, hingga akhirnya data dan statistik (yang seringkali bersifat lagging, diketahui belakangan) membuktikan bahwa para startup ini ternyata berdampak cukup signifikan, dan sialnya, tidak terlalu kentara dampaknya.

Ilustrasi yang mengena adalah cerita tentang seekor kodok. Ketika kodok tersebut dilemparkan ke dalam air yang panas, maka seketika kodok akan melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Namun, ketika kodok dimasukkan ke dalam air yang pelan-pelan dipanaskan hingga mendidih, kodok tidak merasa ada bahaya yang mengancam hingga akhirnya mati di dalam.

Kisah ini pula yang mungkin sedang dialami oleh incumbent di mana-mana di seluruh dunia, baik di sektor transportasi, perhotelan (yang diguncang oleh keberadaan AirBnB), atau bahkan pusat perbelanjaan fisik (yang sekarang mulai tersaingi dengan kemudahan bertransaksi online). Karena disruption tidak terjadi secara mendadak dan “meng-guncang”, maka keberadaannya seringkali diabaikan hingga keadaan menjadi terlambat. Ketika kondisi mulai tidak ideal bagi incumbent, maka dengan power yang dimiliki, incumbent akan berusaha untuk menghambat disruptsi ini.

Salah satunya tentu adalah dengan mengadu kepada regulator dan berusaha membuat peraturan yang mengekang disruptsi tersebut, dengan mengatasnamakan “playing in the same field”. Contoh nyata adalah adanya tarif batas bawah dan atas yang baru saja diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur angkutan online. Bahkan, tidak cukup sampai di situ, pemerintah juga membatasi jumlah angkutan online yang boleh beroperasi. Bukankah ini sebenarnya bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia?

Berbagai kepentingan dan contoh kasus ini semacam inilah yang banyak dibahas oleh Pak Rhenald. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan panduan/guidelines bagaimana seharusnya disruptsi dapat dilakukan, dan bagaimana seharusnya reaksi incumbent jika mengalami efek dari disruptsi tersebut. Menarik untuk disimak dalam waktu mendatang, bagaimana kelanjutan pertarungan antara incumbent melawan disruptive startup. Sebagian incumbent cukup rasional untuk melakukan kerja sama dengan startup (seperti BlueBird yang akhirnya bekerja sama dengan Go-Jek). Sebagian lain yang tidak mampu beradaptasi mulai kelimpungan dan menunjukkan tanda-tanda kegagalan bersaing. Sebaliknya, dari Startup, harus diperhatikan juga bahwa mungkin selama ini mereka masih memiliki sumber pendanaan dari investor yang kuat untuk melawan incumbent dengan cara melakukan subsidi.



Penulis :

Dina Andriani, S.Hum (Pustakawan Madya)

Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan Bulan Januari - Desember Tahun 2017

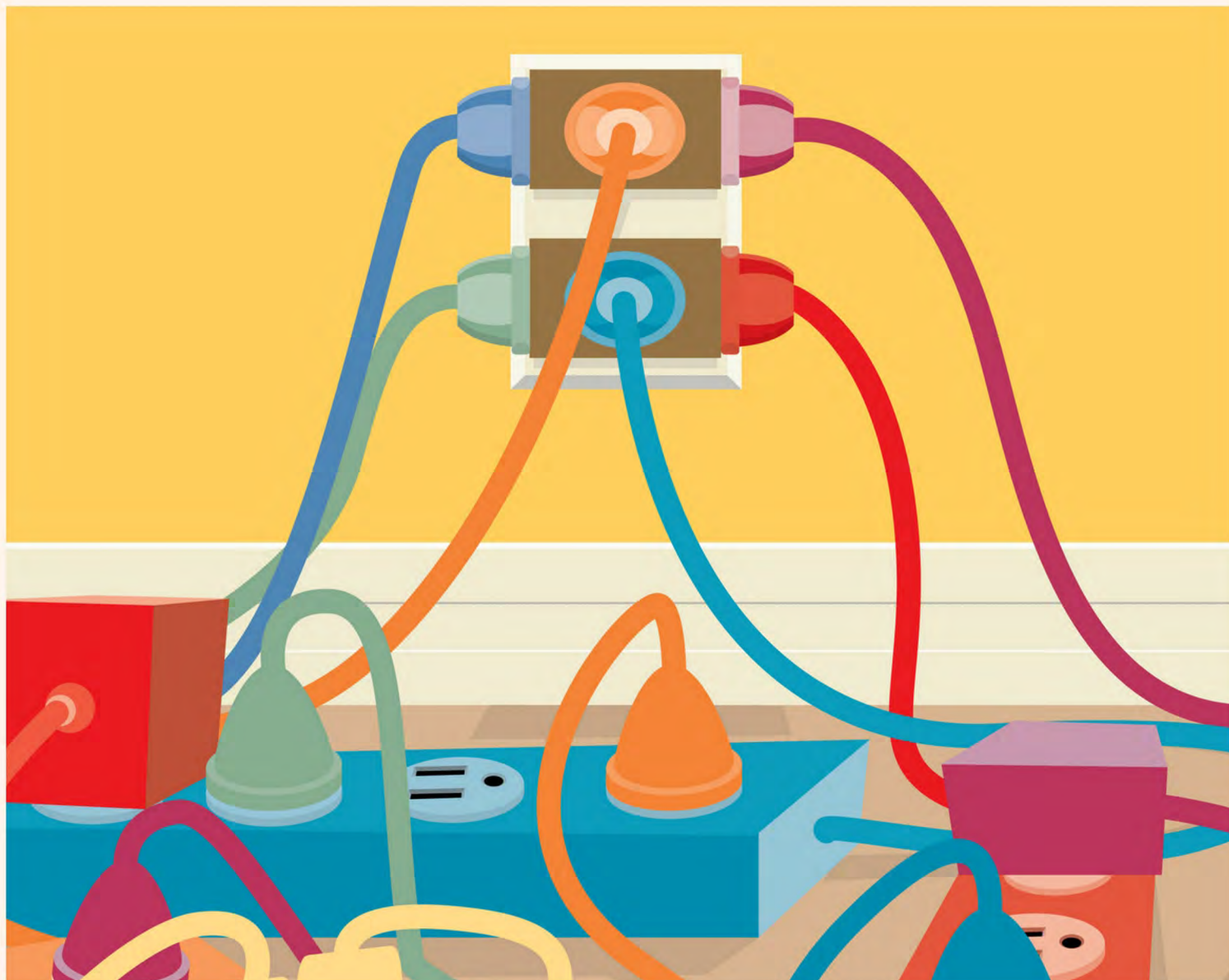
No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK	Status
1.	Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	
2.	Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 2017 tentang rencana Umum Energi Nasional	
3.	Peraturan Presiden RI No.47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	
4.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.01 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
5.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.10 Tahun 2017 Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	<i>Dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik</i>
6.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	<i>Dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik</i>
7.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	<i>Dicabut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik</i>
8.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal	<i>Mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 35/2014</i>

Pojok Peraturan

9.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Eergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	<i>Mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28/2016</i>
10.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power)	<i>Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03/2015</i>
11.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 24 Tahun 2017 Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
12.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.27 Tahun 2017 Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	<i>Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33/2014</i>
13.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.33 Tahun 2017 Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	
14.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	<i>Mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28/2016</i>
15.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	<i>Dicabut Oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50/2017</i>
16.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	<i>Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11/2017</i>
17.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	<i>Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2052 K/40/MEM/2001</i>

Pojok Peraturan

18.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	<i>Mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10/2017</i>
19.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	<i>Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12/2017</i>
20.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.96 K/73/MEM / 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 7891 K/73/MEM/2016 tentang Tim Percepatan Ketentuan Komersialitas Bidang Ketenagalistrikan	
21.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1404 K/20/MEM / 2017 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016	
22.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1750 K/20/MEM / 2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
23.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1415 K/20/MEM / 2017 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d 2026	



GUNAKAN PERALATAN LISTRIK DENGAN BENAR

Penggunaan terminal listrik yang berlebihan dapat memicu
BAHAYA KORSLETING LISTRIK!



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id

RENEWABLE ENERGY



for better future



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.djk.esdm.go.id

